

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG

JALAN. KH. WAHID HASYIM NO.137  
TELP (0321) 861229 FAX (0321)  
674670  
KODE POS 61419

#GISA

## **KATA PENGANTAR**

Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun periode 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Berbagai tantangan dan harapan dalam kurun waktu 2018–2023 diakomodasikan dalam suatu perencanaan strategis, serta dipersepsikan dalam bentuk kebijakan. Tantangan ke depan akan semakin kompleks, sehingga aktualisasi kebijakan strategis sebagai tindak lanjut dari rencana yang telah disusun, sangat perlu menjadi komitmen bersama untuk mencapai hasil optimal. Rencana strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam melaksanakan Administrasi Kependudukan, sehingga pada tahun-tahun berikutnya Jombang menjadi Kabupaten Tertib Administrasi Kependudukan. Selain itu dokumen ini diharapkan juga dapat berfungsi sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui monitoring dan evaluasi.

Dokumen Perubahan Renstra merupakan hasil penelaahan atas pelaksanaan kinerja Bappeda tahun sebelumnya yang selanjutnya sebagai pemutakhiran rencana program, kegiatan dan indikatif anggaran guna memberikan acuan perencanaan program dan penganggaran yang terpadu, berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah, serta sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan dan

penganggaran. Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang harus melakukan sinkronisasi sub kegiatan dan indikator sub kegiatan dengan peraturan tersebut.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan dalam penyusunan P-RENSTRA di tahun mendatang. Semoga Perubahan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa Robbal Alamiin.

Jombang, Juni 2022  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang,



**Drs. MASDUQI ZAKARIA, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670608 199403 1 014

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	12
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	12
2.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	23
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	90

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL .....	94
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	94
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	98
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri.....	103
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	109
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	113
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	117
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	117
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	123
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ...	123
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	127
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan .....	127
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	158
BAB VIII PENUTUP.....	164

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan .....	25
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	26
Tabel 2.3. Sumber Daya Sarana Prasarana .....	27
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang .....	32
Tabel 2.5. Jangka Waktu Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang .....	57
Tabel 2.6. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	67
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	95
Tabel 3.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	103
Tabel 3.3. Renstra Kementerian Dalam Negeri Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan.....	108
Tabel 3.4. Capaian Indikator TPB Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 .....	112
Tabel 3.5. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis.....	115
Tabel 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	120
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	125
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan .....	138

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dispendukcapill Jombang Yang Berkaitan

Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD 2018-2023 .. 159

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Rencana Strategis Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	4
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang .....	14

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya Otonomi Daerah tentunya diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya guna, potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

Program dan kegiatan yang disusun telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kabupaten Jombang. Dalam proses tersebut masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah tersebut harus saling mengisi, saling menunjang dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

Mengingat ruang lingkup pelayanan umum sangat kompleks dan krusial maka senantiasa perlu dikaji dan dievaluasi secara proaktif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Agar tercipta pelayanan yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi, maka perlu disusun Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang baik dan benar dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada prosedur dan hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang, dengan memperhitungkan potensi/kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada.

Rencana Strategis disusun untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang yang memuat tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program serta kegiatan dalam rangka terwujudnya pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

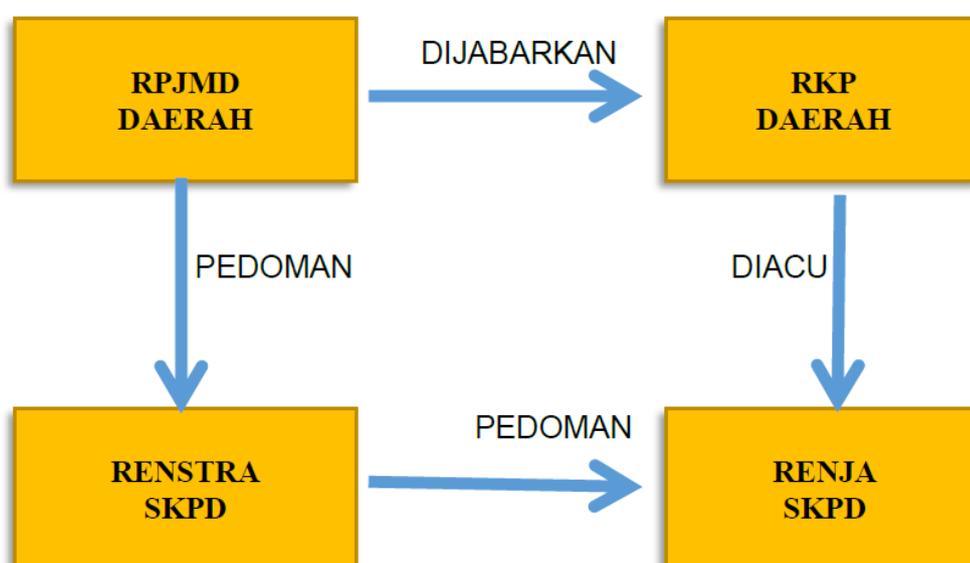
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu perubahan KLHS tahun 2018-2023 dan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 dilatarbelakangi untuk menjalankan amanat yang ditetapkan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berelaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E). Selain itu P-Renstra juga mengakomodir adanya perubahan nomenklatur Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Terakhir, munculnya pandemi

Corona Virus Disease (COVID-19) yang berdampak pada hampir segala sektor pembangunan daerah juga masuk dalam pembahasan Perubahan Renstra Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021, 2022 dan 2023. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dokumen Rencana Kerja memiliki keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra SKPD seperti isu strategis, visi dan misi, strategis kebijakan, tujuan dan sasaran yang

menjadikan dokumen perencanaan Perangkat Daerah menjadi lebih akurat.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dipergunakan sebagai kebijaksanaan guna terselenggaranya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang baik terdiri dari:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Permendagri No. 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021).

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat.
2. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Jombang dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.
3. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam urusan kependudukan dan catatan Sipil, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Jombang.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah ;

1. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan saat ini.
2. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan;

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra;
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis;

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

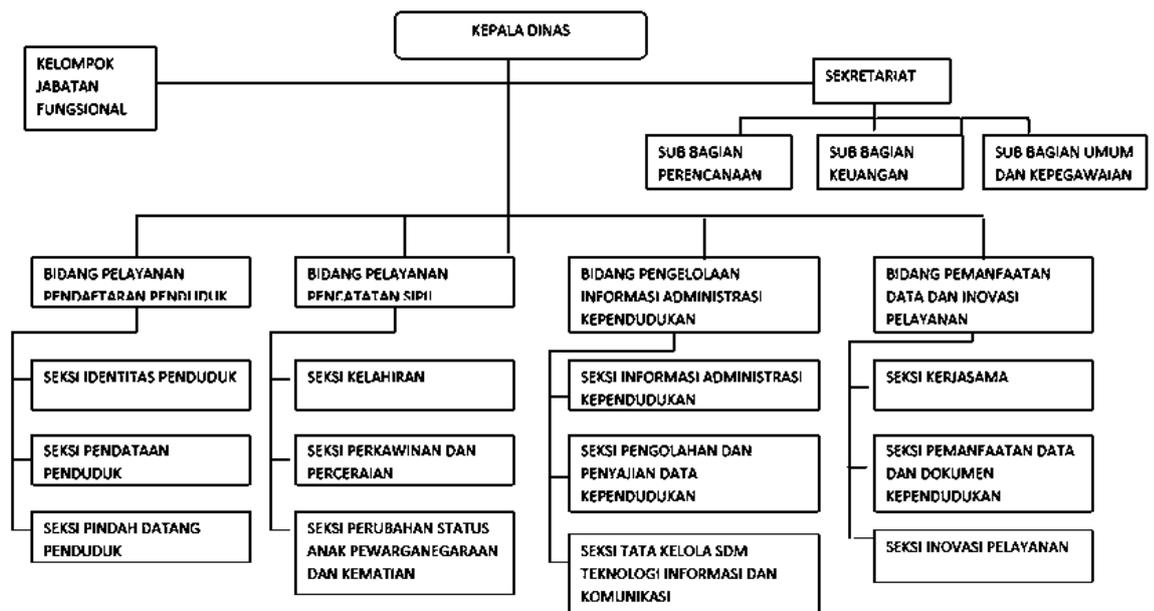
6. Pembinaan penyelenggaraan, fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk, membawahi :
  - a. Seksi Identitas Penduduk;
  - b. Seksi Pindah Datang Penduduk;
  - c. Seksi Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
  - a. Seksi Kelahiran
  - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
  - c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian .
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - a. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan;
  - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

- c. Seksi Tata Kelola SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- a. Seksi Kerjasama
  - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
  - c. Seksi Inovasi Pelayanan

**Gambar 2.1.**  
**Struktur Organisasi Dispendukcapil Kabupaten Jombang**



Sumber Data: Data Kepegawaian Dispendukcapil Kabupaten Jombang

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dalam organisasi terdiri dari sebagai berikut:

### 1. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil

Negara pada semua unsur dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran:
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan:
- c. Pengeloaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/ barang milik daerah:
- d. Pengeloaan urusan Aparatur Sipil Negara:
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Terdiri dari 3 subbag, yaitu:

**a. Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan tugas persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aturan Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara/ barang milik daerah.

**b. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelola keuangan, penatausahaan, akuntansi, vertifikasi dan pembukuan.

### **c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi**

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

## **2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Tugas pokok Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pembina dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan dokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Terdiri dari 3 seksi :

**a. Seksi Identitas Penduduk**

Seksi Identitas Penduduk, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

**b. Seksi Pindah Datang Penduduk**

Seksi Pindah Datang Penduduk, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk.

**c. Seksi Pendataan Penduduk**

Seksi Pendataan Penduduk, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk.

**3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Tugas pokok Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pelayanan Catatan Sipil, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Terdiri dari seksi:

a. **Seksi Kelahiran**

Seksi Kelahiran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, dan pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran.

b. **Seksi Perkawinan dan Perceraian**

Seksi Perkawinan dan Perceraian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan perkawinan dan perceraian.

### **c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan kematian**

Seksi Perubahan Status Anak, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian.

## **4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Tugas pokok Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah melaksanakan persiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi, Administrasi Kependudukan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Terdiri dari 3 seksi antara lain:

**a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**

Seksi Sistem Informasi, Pengolahan dan Penyajian Data memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.

#### **b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan**

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

#### **c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

### **5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**

Tugas Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan memiliki fungsi, antara lain:

- a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Terdiri dari 3 seksi antara lain:

**a. Seksi Kerjasama**

Seksi Kerjasama memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama.

**b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan**

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

### **c. Seksi Inovasi Pelayanan**

Seksi Inovasi Pelayanan memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan inovasi pelayanan.

## **2.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Sumberdaya manusia merupakan unsur yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sebagai sebuah institusi pelayanan hingga Juni 2022 memiliki personil karyawan sebanyak 63 (Enam Puluh Tiga) dimana pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) orang dan Tenaga Honorar sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang merupakan instansi pelayanan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan dan pengesahan kejadian vital penduduk untuk memperoleh kepastian hukum dan tertib Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil. Cakupan pencatatan yang dilaksanakan meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, perkawinan,

perceraian, kematian, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak. Dokumen hasil pencatatan sipil ini merupakan dokumen yang berlaku universal.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Penerapan SIAK tersebut dilaksanakan sebagai upaya penertiban Administrasi Kependudukan melalui kegiatan digitalisasi. Sebagai instansi yang menyediakan jasa layanan secara langsung kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dituntut untuk memberikan pelayanan secara prima. Tuntutan tersebut dapat terpenuhi melalui peningkatan kualitas dari sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

Berikut merupakan gambaran komposisi pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang saat ini bila ditinjau dari tingkat Golongan/Ruang dan Pendidikan terakhir:

## 1. Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menurut Golongan/Ruang.

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1	II/a	-
2	II/b	1
3	II/c	1
4	II/d	2
4	III/a	2
5	III/b	4
6	III/c	1
7	III/d	10
8	IV/a	5
9	IV/b	1
10	IV/c	1
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>

Sumber Data: Rekap Data Kepegawaian Dispendukcapil Kabupaten Jombang

Dari tabel tingkat golongan dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terbanyak golongan III dan yang paling sedikit adalah Golongan II. Secara terperinci Golongan II/a sebanyak 0 orang, Golongan II/b sebanyak 1 orang, Golongan II/c sebanyak 1 orang, Golongan II/d sebanyak 2 orang, Golongan III/a sebanyak 2 orang, Golongan III/b sebanyak 4 orang, Golongan III/c sebanyak 1 orang, Golongan III/d sebanyak 10 orang, Golongan IV/a sebanyak 5

orang, Golongan IV/b sebanyak 1 orang dan Golongan IV/c sebanyak 1 orang.

## 2. Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menurut Pendidikan

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	SD	-
2	SMA/SMK	3
3	Diploma	1
4	S1	18
5	S-2	6
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>

Sumber Data: Rekap Data Kepegawaian Dispendukcapil Kabupaten Jombang

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah total pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang adalah sebanyak 28 orang dengan pengelompokan berdasarkan pendidikan terakhir sebagai berikut: SMA/SMK sebanyak 3 orang, Diploma sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 18 orang dan S2 sebanyak 6 orang. Secara keseluruhan kualifikasi pendidikan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah cukup baik, namun demikian ditinjau dari segi jumlah dirasa masih sangat kurang mengingat beban kerja yang sangat besar.

## 2.2.2. Sumberdaya Sarana Prasarana

**Tabel 2.3**  
**Sumber Daya Sarana Prasarana**

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK
1	Transportable Generating Set	2	2		
2	Pompa air	2	2		
3	Station Wagon	5	5		
4	Minibus	1	1		
5	Sepeda Motor	19	19		
6	Mesin Ketik Manual Portable	4	4		
7	Mesin Fotokopi Double Folio	1	1		
8	Lemari Besi/Metal	5	5		
9	Lemari Kayu	15	15		
10	Rak Besi/Metal	29	29		
11	Rak Server	4	4		
12	Rak Kayu	125	125		
13	Filling Besi/Metal	23	23		
14	Locker	1	1		
15	CCTV	1	1		
16	Papan Visual	1	1		
17	Alat Penghancur Kertas	1	1		
18	Mesin Absensi	2	2		
19	Alat Pemotong Kertas	1	1		
20	Alat Sidik Jari	17	17		
21	Papan Pengumuman	1	1		
22	Meja Kerja Kayu	1	1		
23	Kursi Kayu/Rotan	1	1		
24	Tempat Tidur Kayu	1	1		
25	Meja Resepsionis	1	1		
26	Meja Panjang	2	2		
27	Meja 1/2 Biro	48	48		
28	Sketsel/Penyekat	2	2		
29	Kursi Rapat	124	124		
30	Kursi Putar	10	10		
31	Kursi Biasa	8	8		
32	Bangku Tunggu	30	30		
33	Partisi	11	11		
34	Sofa	2	2		
35	Mesin Penghisap Debu	1	1		
36	Lemari Es	2	2		

37	A.C. Split	25	25		
38	AC Standing	2	2		
39	Kipas Angin	18	18		
40	Exhaust Fan	7	7		
41	Televisi	3	3		
42	Amplifier	1	1		
43	Sound System	6	6		
44	Wireless	1	1		
45	UPS	95	95		
46	Tangga Aluminium	1	1		
47	Dispenser	5	5		
48	Handy Cam	1	1		
49	Tandon Air	1	1		
50	Alat Pemadam Portable	1	1		
51	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9	9		
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	17	17		
53	Camera Electronic	26	26		
54	Proyektor	2	2		
55	Telephone	1	1		
56	Faksimile	1	1		
57	Kursi Roda	2	2		
58	P.C. Unit	124	124		
59	Laptop/Notebook	39	39		
60	Tablet PC	1	1		
61	Card Reader	22	22		
62	Monitor	76	76		
63	Printer	131	131		
64	Scanner	6	6		
65	Hardisk	1	1		
66	Video Splitter	1	1		
67	NAS	1	1		
68	Server	6	6		
69	Router	5	5		
70	Hub	40	40		
71	Modem	5	5		
72	Access Point	39	39		
73	Anjungan Dukcapil Mandiri	3	3		
74	Iris Scanner	16	16		
75	Signature Pad	16	16		
76	Telephone Mobile	1	1		
77	Peralatan Permainan	1	1		
78	Firewall	1	1		
79	KVM Keyboard Monitor	1	1		

80	Tripod	16	16		
81	Peralatan Rekam Mobile	1	1		
82	Camera Adaptor	16	16		
83	Aset Tak Berwujud	6	6		
84	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2		
85	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1	1		
86	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	1		
87	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	2	2		
88	Jaringan Transmisi Tegangan di bawah 1 KVA	1	1		
89	Jaringan Transmisi Lain-Lain	1	1		

Sumber Data: Rekap Data Bagian Umum Dispendukcapil Kabupaten Jombang

Berkaitan dengan penyelenggaraan kantor dinas, perangkat lunak telah terpenuhi melalui SIAK, aplikasi URUS KTP EL, CAK NGATESO dan NING YAONAH. Operasional pelayanan jemput bola di lapangan didukung oleh 4 (empat) kendaraan dinas operasional yang kondisinya baik dan selalu terawat. Sedangkan untuk pelaksanaan penyelenggaraan kantor saat ini menggunakan kantor yang terletak dalam kompleks perkantoran sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Kondisi gedung masih baik walaupun dibutuhkan perbaikan untuk beberapa bagian gedung, terutama untuk gudang arsip dan ruang tunggu pelayanan.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pada hakekatnya upaya Tertib Administrasi Kependudukan, bukan sekadar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem dan konkrit. Artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa penting (*vital event*) yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki insentif/benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk. Upaya tersebut, merupakan tugas negara atau pemerintah sebagai pelayan publik, dan menjadi urusan wajib.

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang akan menjadi pondasi penyusunan rencana strategis serta perwujudan komitmen untuk pencapaian visi. Dengan demikian, berdasarkan visi, tupoksi serta kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka ditetapkan misi sebagai arah, tujuan dan sasaran yang dicita-citakan selama lima tahun mendatang, sebagai berikut:

**“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH  
DAN PROFESIONAL”**

Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dapat dijabarkan melalui tabel berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Jombang**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>RENSTRA 2018-2023</b>																			
	Indikator Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan		√		96.29	96.29	NA	NA	NA	94.81	84.25	NA	NA	NA	98.46%	87.50%	NA	NA	NA
	Prosentase Cakupan Penerbitan KK;		√		85%	87%	NA	NA	NA	86.62%	93.72%	NA	NA	NA	101.91%	107.72%	NA	NA	NA
	Prosentase Cakupan Penerbitan KTP;		√		92%	93%	NA	NA	NA	97.14%	98.01%	NA	NA	NA	105.59%	105.39%	NA	NA	NA
	Prosentase Cakupan Penerbitan KIA;		√		8%	22%	NA	NA	NA	21.68%	41.58%	NA	NA	NA	271.00%	189.00%	NA	NA	NA
	Persentase pengajuan KK untuk diterbitkan		√		80%	85%	NA	NA	NA	90.96%	91.54%	NA	NA	NA	113.70%	107.69%	NA	NA	NA
	Persentase pengajuan KTP el untuk diterbitkan		√		80%	85%	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	NA	NA	NA	125.00%	117.65%	NA	NA	NA

	<b>Presentase pengajuan KIA untuk diterbitkan</b>		√		75%	80%	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	NA	NA	NA	133.33%	125.00%	NA	NA	NA
	<b>Presentase pengajuan SKTT bagi WNA yang memiliki KITAS untuk diterbitkan</b>		√		85%	85%	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	NA	NA	NA	117.65%	117.65%	NA	NA	NA
	Jumlah pelayanan pengajuan KK		√		90000	81000	NA	NA	NA	81087	78,059	NA	NA	NA	90.10%	96.37%	NA	NA	NA
	Jumlah pelayanan pengajuan KTP el		√		125000	75000	NA	NA	NA	100356	109,573	NA	NA	NA	80.28%	146.10%	NA	NA	NA
	Jumlah Pelayanan Pengajuan KIA		√		23000	24000	NA	NA	NA	69864	43,472	NA	NA	NA	303.76%	181.13%	NA	NA	NA
	Jumlah pelayanan pengajuan SKTT		√		10	12	NA	NA	NA	42	21	NA	NA	NA	420.00%	175.00%	NA	NA	NA
	<b>Persentase pengajuan surat datang WNI untuk diterbitkan</b>		√		80%	85%	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	125.00%	117.65%	NA	NA	NA
	<b>Persentase pengajuan surat pindah WNI untuk diterbitkan</b>		√		80%	85%	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	125.00%	117.65%	NA	NA	NA
	<b>Persentase pengajuan surat keterangan datang luar negeri untuk diterbitkan</b>		√		80%	85%	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	125.00%	117.65%	NA	NA	NA
	Jumlah pengajuan pelayanan Surat Datang WNI		√		10000	10000	NA	NA	NA	7364	6,111	NA	NA	NA	73.64%	61.11%	NA	NA	NA
	Jumlah pengajuan pelayanan Surat Keluar WNI		√		7500	7600	NA	NA	NA	7315	5,834	NA	NA	NA	97.53%	76.76%	NA	NA	NA
	Jumlah pengajuan pelayanan Surat Keterangan Datang Luar Negeri		√		100	110	NA	NA	NA	83	65	NA	NA	NA	83.00%	59.09%	NA	NA	NA
	<b>Jumlah perekaman terhadap wajib KTP el</b>		√		60000	60000	NA	NA	NA	18920	17698	NA	NA	NA	31.53%	29.50%	NA	NA	NA

	<b>Persentase pengajuan SKPTI dan SKOT bagi penduduk rentan untuk diterbitkan</b>		√		80%	85%	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	NA	NA	NA	125.00%	117.65%	NA	NA	NA
	Jumlah pengajuan pelayanan SKPTI dan SKOT		√		100	100	NA	NA	NA	76	70	NA	NA	NA	76.00%	70.00%	NA	NA	NA
	<b>Prosentase pemanfaatan data administrasi kependudukan oleh instansi lain;</b>		√		100%	75%	NA	NA	NA	50%	100%	NA	NA	NA	50.00%	133.33%	NA	NA	NA
	<b>Persentase kerjasama data yang disahkan dengan instansi lain</b>		√		100%	70%	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	142.86%	NA	NA	NA
	Jumlah rancangan perjanjian kerjasama yang disusun		√		5	5	NA	NA	NA	3	4	NA	NA	NA	60.00%	80.00%	NA	NA	NA
	<b>Persentase pemanfaatan data oleh instansi lain</b>		√		100%	70%	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	142.86%	NA	NA	NA
	Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan		√		5	5	NA	NA	NA	1	4	NA	NA	NA	20.00%	80.00%	NA	NA	NA
	<b>persentase inovasi pelayanan yang diterapkan</b>		√		NA	70%	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	142.86%	NA	NA	NA
	Jumlah pengajuan usulan inovasi pelayanan		√		5	5	NA	NA	NA	6	4	NA	NA	NA	120.00%	80.00%	NA	NA	NA
	<b>Prosentase pelaporan data administrasi kependudukan oleh instansi lain;</b>		√		70%	100%	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	142.86%	100.00%	NA	NA	NA

	<b>Persentase validasi pelaporan data administrasi kependudukan</b>		√		100%	100%	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	NA	NA	NA
	<b>Persentase validasi data kependudukan yang anomali dan ganda</b>		√		100%	100%	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	NA	NA	NA
	Jumlah Penyusunan laporan data administrasi kependudukan		√		24	24	NA	NA	NA	24	24	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	NA	NA	NA
	Jumlah validasi data kependudukan dari data ganda dan anomali		√		50000	50000	NA	NA	NA	63006	57000	NA	NA	NA	126.01%	114.00%	NA	NA	NA
	<b>Persentase pengelolaan jaringan SIAK secara online</b>		√		100%	100%	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	NA	NA	NA
	Jumlah Pengelolaan jaringan SIAK secara online		√		252	252	NA	NA	NA	252	252	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA
	Jumlah peserta Bimtek untuk Operator SIAK		√		100	100	NA	NA	NA	100	102	NA	NA	NA	100%	102%	NA	NA	NA
	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi administrasi kependudukan		√		650	650	NA	NA	NA	450	1209	NA	NA	NA	69%	186%	NA	NA	NA
	Jumlah leaflet yang terdistribusi		√		5200	8380	NA	NA	NA	5200	0	NA	NA	NA	100%	0%	NA	NA	NA
	<b>Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran;</b>		√		75%	78%	NA	NA	NA	79.52%	86.54%	NA	NA	NA	106.03%	110.95%	NA	NA	NA

	Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan;		√		100%	100%	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	NA	NA	NA
	Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Perceraian;		√		100%	100%	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	NA	NA	NA
	Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian;		√		100%	100%	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	NA	NA	NA
	Persentase Pencatatan Kelahiran;		√		100%	100%	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	NA	NA	NA
	Persentase Pencatatan Perceraian		√		100%	100%	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	NA	NA	NA
	Persentase Pencatatan Perkawinan;		√		100%	100%	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	NA	NA	NA
	Persentase Pencatatan Kematian;		√		100%	100%	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	NA	NA	NA
	Jumlah pelayanan pengajuan akta kelahiran		√		20100	20100	NA	NA	NA	31675	20,697	NA	NA	NA	158%	103%	NA	NA	NA
	Jumlah pelayanan pengajuan akta perkawinan		√		100	100	NA	NA	NA	114	96	NA	NA	NA	114%	96%	NA	NA	NA
	Jumlah pelayanan pengajuan akta perceraian		√		20	20	NA	NA	NA	26	22	NA	NA	NA	130%	110%	NA	NA	NA
	Jumlah pelayanan pengajuan akta kematian		√		500	500	NA	NA	NA	617	912	NA	NA	NA	123%	182%	NA	NA	NA
	Jumlah pelayanan pengajuan perubahan kutipan II akta		√		2000	2000	NA	NA	NA	2197	1,933	NA	NA	NA	110%	97%	NA	NA	NA
	<b>Nilai Evaluasi SAKIP</b>		√		<b>80.15</b>	<b>80.15</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>74.8</b>	<b>80.12</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>93%</b>	<b>100%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran</b>		√		100%	100%	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	NA	NA	NA
	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		√		29	29	NA	NA	NA	29	29	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA
	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa administrasi teknis perkantoran		√		36	36	NA	NA	NA	36	36	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA
	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan</b>		√		100%	100%	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	NA	NA	NA
	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor		√		54	54	NA	NA	NA	45	45	NA	NA	NA	83%	83%	NA	NA	NA
	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya		√		4	4	NA	NA	NA	4	4	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA
	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor		√		144	144	NA	NA	NA	223	223	NA	NA	NA	155%	155%	NA	NA	NA
	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional		√		6	6	NA	NA	NA	6	6	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA
	<b>Jumlah dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan</b>		√		22	22	NA	NA	NA	22	22	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA

	Jumlah dokumen rencana strategis SKPD tersusun		√		1	1	NA	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA
	Jumlah dokumen rencana kerja SKPD tersusun		√		2	2	NA	NA	NA	2	2	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA
	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD tersusun		√		35	35	NA	NA	NA	35	35	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA
	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD tersusun		√		18	18	NA	NA	NA	18	18	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA
	<b>Persentase Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>		√		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
	Jumlah kebutuhan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terpenuhi		√		11	11	NA	NA	NA	11	11	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA
	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK dan perangkat pendukungnya		√		1	1	NA	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA

**PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 (I)**

	<b>Indeks Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>		√		<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>8.19</b>	<b>8.19</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>8.79</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>107.36%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>		√		<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>84.25</b>	<b>84.25</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>93.29</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>110.73%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

	<b>Indeks Pelayanan Publik</b>		√		NA	NA	3.98	3.98	NA	NA	NA	4.128	NA	NA	NA	NA	103.72%	NA	NA
	<b>Nilai Evaluasi SAKIP</b>		√		NA	NA	80.15	80.15	NA	NA	NA	80.44	NA	NA	NA	NA	100.36%	NA	NA
	<b>Prosentase Cakupan Penerbitan KK;</b>		√		NA	NA	89%	91%	NA	NA	NA	122.60%	NA	NA	NA	NA	137.75%	NA	NA
	<b>Prosentase Cakupan Penerbitan KTP el;</b>		√		NA	NA	94%	95%	NA	NA	NA	97.88%	NA	NA	NA	NA	104.13%	NA	NA
	<b>Prosentase Cakupan Penerbitan KIA;</b>		√		NA	NA	37%	38%	NA	NA	NA	50.67%	NA	NA	NA	NA	136.95%	NA	NA
	Persentase pengajuan KK untuk diterbitkan		√		NA	NA	90%	92%	NA	NA	NA	91.77%	NA	NA	NA	NA	101.97%	NA	NA
	Persentase pengajuan KTP el untuk diterbitkan		√		NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Persentase pengajuan KIA untuk diterbitkan		√		NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Persentase pengajuan SKTT bagi WNA yang memiliki KITAS untuk diterbitkan		√		NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Persentase pengajuan surat datang WNI untuk diterbitkan		√		NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Persentase pengajuan surat pindah WNI untuk diterbitkan		√		NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Persentase pengajuan surat keterangan datang luar negeri untuk diterbitkan		√		NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA

	Persentase pengajuan SKPTI dan SKOT bagi penduduk rentan untuk diterbitkan		√		NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA	NA	NA	<b>100.00%</b>	NA	NA
	Jumlah pelayanan pengajuan KK		√		NA	NA	82000	82000	NA	NA	NA	86203	NA	NA	NA	NA	105.13%	NA	NA
	Jumlah pelayanan pengajuan KTP el		√		NA	NA	75000	75000	NA	NA	NA	106745	NA	NA	NA	NA	142.33%	NA	NA
	Jumlah Pelayanan Pengajuan KIA		√		NA	NA	25000	25000	NA	NA	NA	33050	NA	NA	NA	NA	132.20%	NA	NA
	Jumlah pelayanan pengajuan SKTT		√		NA	NA	15	15	NA	NA	NA	66	NA	NA	NA	NA	440.00%	NA	NA
	Jumlah pengajuan pelayanan Surat Datang WNI		√		NA	NA	10500	10500	NA	NA	NA	6780	NA	NA	NA	NA	64.57%	NA	NA
	Jumlah pengajuan pelayanan Surat Keluar WNI		√		NA	NA	7700	7700	NA	NA	NA	7128	NA	NA	NA	NA	92.57%	NA	NA
	Jumlah pengajuan pelayanan Surat Keterangan Datang Luar Negeri		√		NA	NA	120	120	NA	NA	NA	58	NA	NA	NA	NA	48.33%	NA	NA
	Jumlah pengajuan pelayanan SKPTI dan SKOT		√		NA	NA	100	100	NA	NA	NA	112	NA	NA	NA	NA	112.00%	NA	NA
	Jumlah Perekaman Terhadap Wajib KTP el		√		NA	NA	12000	12000	NA	NA	NA	23429	NA	NA	NA	NA	195.24%	NA	NA

	<b>Prosentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data yang disusun</b>		√		NA	NA	25%	31%	NA	NA	NA	26.83%	NA	NA	NA	NA	107.32%	NA	NA
	<b>Prosentase pelaporan data administrasi kependudukan</b>		√		NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	jumlah pelaporan data administrasi kependudukan yang dikirim		√		NA	NA	24	24	NA	NA	NA	44	NA	NA	NA	NA	183.33%	NA	NA
	jumlah validasi kependudukan yang anomali dan ganda		√		NA	NA	30000	30000	NA	NA	NA	27292	NA	NA	NA	NA	90.97%	NA	NA
	Jumlah perjanjian kerjasama yang disahkan		√		NA	NA	4	4	NA	NA	NA	4	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	jumlah penyusunan laporan data administrasi kependudukan		√		NA	NA	24	24	NA	NA	NA	44	NA	NA	NA	NA	183.33%	NA	NA
	Jumlah identifikasi data kependudukan dari data ganda dan anomali		√		NA	NA	30000	30000	NA	NA	NA	27292	NA	NA	NA	NA	90.97%	NA	NA
	Jumlah rancangan perjanjian kerjasama yang disusun		√		NA	NA	4	4	NA	NA	NA	4	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Jumlah pembaharuan aplikasi SIAK dan aplikasi pendukung lain		√		NA	NA	2	2	NA	NA	NA	7	NA	NA	NA	NA	350.00%	NA	NA
	Jumlah pengelolaan jaringan SIAK di kecamatan		√		NA	NA	21	21	NA	NA	NA	27	NA	NA	NA	NA	128.57%	NA	NA
	Jumlah Bimbingan Teknis Operator		√		NA	NA	2	2	NA	NA	NA	2	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA

	Jumlah maintenance jaringan SIAK di kecamatan dan dinas		√		NA	NA	21	21	NA	NA	NA	27	NA	NA	NA	NA	128.57%	NA	NA
	Jumlah maintenance aplikasi SIAK dan aplikasi pendukung lain		√		NA	NA	2	2	NA	NA	NA	7	NA	NA	NA	NA	350.00%	NA	NA
	Jumlah peserta Bimtek Operator		√		NA	NA	100	100	NA	NA	NA	143	NA	NA	NA	NA	143.00%	NA	NA
	Jumlah instansi yang telah memanfaatkan data kependudukan		√		NA	NA	4	4	NA	NA	NA	4	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Jumlah sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan		√		NA	NA	21	21	NA	NA	NA	21	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi administrasi kependudukan		√		NA	NA	340	340	NA	NA	NA	272	NA	NA	NA	NA	80.00%	NA	NA
	Jumlah leaflet yang terdistribusikan		√		NA	NA	1750	1750	NA	NA	NA	1750	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	jumlah pengajuan pemanfaatan data kependudukan oleh instansi		√		NA	NA	4	4	NA	NA	NA	4	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	<b>Persentase Inovasi pelayanan yang diterapkan</b>		√		NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Jumlah Inovasi pelayanan yang diterapkan		√		NA	NA	3	3	NA	NA	NA	3	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Jumlah pengajuan usulan inovasi pelayanan		√		NA	NA	3	3	NA	NA	NA	3	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA

	<b>Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran;</b>		√		NA	NA	95%	95%	NA	NA	NA	90.34%	NA	NA	NA	NA	95.09%	NA	NA
	Persentase Pencatatan Kelahiran		√		NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Jumlah pelayanan pengajuan akta kelahiran		√		NA	NA	20100	20100	NA	NA	NA	26433	NA	NA	NA	NA	131.51%	NA	NA
	Persentase Pencatatan Perceraian		√		NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Persentase Pencatatan Perkawinan;		√		NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Persentase Pencatatan Kematian		√		NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Jumlah pelayanan pengajuan akta perkawinan		√		NA	NA	100	100	NA	NA	NA	110	NA	NA	NA	NA	110.00%	NA	NA
	Jumlah pelayanan pengajuan akta perceraian		√		NA	NA	20	20	NA	NA	NA	18	NA	NA	NA	NA	90.00%	NA	NA
	Jumlah pelayanan pengajuan akta kematian		√		NA	NA	1000	1000	NA	NA	NA	1814	NA	NA	NA	NA	181.40%	NA	NA
	Jumlah pelayanan pengajuan perubahan kutipan II akta		√		NA	NA	2000	2000	NA	NA	NA	2947	NA	NA	NA	NA	147.35%	NA	NA
	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur</b>		√		NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	122.38%	NA	NA	NA	NA	122.38%	NA	NA

	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan		√		NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA	NA	NA	<b>100.00%</b>	NA	NA
	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun		√		NA	NA	71	71	NA	NA	NA	71	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun		√		NA	NA	31	31	NA	NA	NA	31	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu		√		NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA	NA	NA	<b>100.00%</b>	NA	NA
	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		√		NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan		√		NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA	NA	NA	<b>100.00%</b>	NA	NA
	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Duspendukcapil yang di fasilitasi		√		NA	NA	12	12	NA	NA	NA	12	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		√		NA	NA	NA	12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang tersusun		√		NA	NA	18	18	NA	NA	NA	18	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawainan		√		NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	<b>100.00%</b>	NA	NA

	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi		√		NA	NA	NA	68	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Jumlah dokumen kepegawaian yang meliputi DUK, surat ijin, cuti pegawai, usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, mutasi, dan naskah kepegawaian yang lainnya		√		NA	NA	150	150	NA	NA	NA	469	NA	NA	NA	NA	312.67%	NA	NA
	Jumlah dokumen sasaran kinerja pegawai yang disusun		√		NA	NA	51	62	NA	NA	NA	125	NA	NA	NA	NA	245.10%	NA	NA
	Jumlah data pegawai yang diupdate pada sistem informasi aplikasi pelayanan Aparatur Sipil Negara (SIAP ASN)		√		NA	NA	50	50	NA	NA	NA	48	NA	NA	NA	NA	96.00%	NA	NA
	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		√		NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	<b>100.00%</b>	NA	NA
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi		√		NA	NA	13	13	NA	NA	NA	15	NA	NA	NA	NA	115.38%	NA	NA
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi		√		NA	NA	61	61	NA	NA	NA	30	NA	NA	NA	NA	49.18%	NA	NA
	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang tersusun		√		NA	NA	4	4	NA	NA	NA	4	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA

Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	√	NA	NA	68	68	NA	NA	NA	68	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
Jumlah pemenuhan barang cetak	√	NA	NA	65845	65845	NA	NA	NA	14408	NA	NA	NA	NA	21.88%	NA	NA
Jumlah pemenuhan barang penggandaan	√	NA	NA	24792	24792	NA	NA	NA	55856	NA	NA	NA	NA	225.30%	NA	NA
Jumlah pemenuhan bahan bacaan	√	NA	NA	12	12	NA	NA	NA	17	NA	NA	NA	NA	141.67%	NA	NA
Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	√	NA	NA	624	624	NA	NA	NA	223	NA	NA	NA	NA	35.74%	NA	NA
Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	√	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	<b>100.00%</b>	NA	NA
Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	√	NA	NA	3	142	NA	NA	NA	161	NA	NA	NA	NA	5366.67%	NA	NA
Persentase pemenuhan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	√	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	<b>100.00%</b>	NA	NA
Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	√	NA	NA	3	3	NA	NA	NA	22	NA	NA	NA	NA	733.33%	NA	NA
Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	√	NA	NA	12	12	NA	NA	NA	12	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	√	NA	NA	2	2	NA	NA	NA	10	NA	NA	NA	NA	500.00%	NA	NA
Persentase Barang milik Daerah dalam kondisi baik	√	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	<b>100.00%</b>	NA	NA

	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara		√		NA	NA	1	1	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajaknya		√		NA	NA	1	1	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara		√		NA	NA	5	5	NA	NA	NA	5	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya		√		NA	NA	5	5	NA	NA	NA	14	NA	NA	NA	NA	280.00%	NA	NA
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara		√		NA	NA	145	145	NA	NA	NA	162	NA	NA	NA	NA	111.72%	NA	NA
	Jumlah gedung yang dipelihara		√		NA	NA	N/A	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<b>Presentase Pemenuhan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>		√		NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		√		NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Jumlah pemenuhan administrasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil		√		NA	NA	45	NA	NA	NA	NA	45	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA

	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka penerapan Dukcapil Go Digital		√		NA	NA	8	NA	NA	NA	NA	8	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		√		NA	NA	400	NA	NA	NA	NA	400	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Persentase pemenuhan kebutuhan tim terkait pencapaian target nasional		√		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Jumlah pemenuhan kebutuhan tim terkait pencapaian target nasional		√		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Persentase pemenuhan pelaksanaan sosialisasi administrasi kependudukan		√		NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Jumlah peserta sosialisasi administrasi kependudukan		√		NA	NA	12	NA	NA	NA	NA	12	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA
	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pelaksanaan peningkatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		√		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Jumlah paket /surat dikirimkan		√		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 (II)</b>																			
	<b>Indeks Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>		√		NA	NA	NA	NA	8.19	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>		√		NA	NA	NA	NA	84.25	NA									
	<b>Indeks Pelayanan Publik</b>		√		NA	NA	NA	NA	3.98	NA									
	<b>Prosentase Cakupan Penerbitan KK;</b>		√		NA	NA	NA	NA	93%	NA									
	<b>Prosentase Cakupan Penerbitan KTP el;</b>		√		NA	NA	NA	NA	96%	NA									
	<b>Prosentase Cakupan Penerbitan KIA;</b>		√		NA	NA	NA	NA	39%	NA									
	Persentase pengajuan KK untuk diterbitkan		√		NA	NA	NA	NA	95%	NA									
	Persentase pengajuan KTP el untuk diterbitkan		√		NA	NA	NA	NA	100%	NA									
	Persentase pengajuan KIA untuk diterbitkan		√		NA	NA	NA	NA	100%	NA									
	Persentase pengajuan SKTT bagi WNA yang memiliki KITAS untuk diterbitkan		√		NA	NA	NA	NA	100%	NA									
	Persentase pengajuan surat datang WNI untuk diterbitkan		√		NA	NA	NA	NA	100%	NA									
	Persentase pengajuan surat pindah WNI untuk diterbitkan		√		NA	NA	NA	NA	100%	NA									
	Persentase pengajuan surat keterangan datang luar negeri untuk diterbitkan		√		NA	NA	NA	NA	100%	NA									
	Persentase pengajuan SKPTI dan SKOT bagi penduduk rentan untuk diterbitkan		√		NA	NA	NA	NA	100%	NA									

	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Kependudukan		√		NA	NA	NA	NA	182015 berkas	NA									
	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan		√		NA	NA	NA	NA	18320 berkas	NA									
	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		√		NA	NA	NA	NA	100 berkas	NA									
	<b>Prosentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data yang disusun</b>		√		NA	NA	NA	NA	35%	NA									
	<b>Prosentase pelaporan data administrasi kependudukan</b>		√		NA	NA	NA	NA	100%	NA									
	jumlah pelaporan data administrasi kependudukan yang dikirim		√		NA	NA	NA	NA	24 dokumen	NA									
	jumlah validasi kependudukan yang anomali dan ganda		√		NA	NA	NA	NA	30000 data	NA									
	Jumlah perjanjian kerjasama yang disahkan		√		NA	NA	NA	NA	4 PKS	NA									
	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		√		NA	NA	NA	NA	4 dokumen	NA									
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		√		NA	NA	NA	NA	4 PKS	NA									
	Jumlah pembaharuan aplikasi SIAK dan aplikasi pendukung lain		√		NA	NA	NA	NA	2 aplikasi	NA									

Jumlah pengelolaan jaringan SIAK di kecamatan		√		NA	NA	NA	NA	21 kecamatan	NA										
Jumlah Bimbingan Teknis Operator		√		NA	NA	NA	NA	2 kali	NA										
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		√		NA	NA	NA	NA	21 Laporan	NA										
Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		√		NA	NA	NA	NA	2 Laporan	NA										
Jumlah instansi yang telah memanfaatkan data kependudukan		√		NA	NA	NA	NA	4 instansi	NA										
Jumlah sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan		√		NA	NA	NA	NA	21 kecamatan	NA										
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		√		NA	NA	NA	NA	4 dokumen	NA										
Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		√		NA	NA	NA	NA	4 laporan	NA										
<b>Persentase Inovasi pelayanan yang diterapkan</b>		√		NA	NA	NA	NA	100%	NA										
Jumlah Inovasi pelayanan yang diterapkan		√		NA	NA	NA	NA	3 inovasi	NA										

	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		√		NA	NA	NA	NA	2 Dokumen	NA									
	<b>Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran;</b>		√		NA	NA	NA	NA	95%	NA									
	Persentase Pencatatan Kelahiran		√		NA	NA	NA	NA	100%	NA									
	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan		√		NA	NA	NA	NA	26433 dokumen	NA									
	Persentase Pencatatan Perceraian		√		NA	NA	NA	NA	100%	NA									
	Persentase Pencatatan Perkawinan;		√		NA	NA	NA	NA	100%	NA									
	Persentase Pencatatan Kematian		√		NA	NA	NA	NA	100%	NA									
	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		√		NA	NA	NA	NA	130 dokumen	NA									
	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		√		NA	NA	NA	NA	8947 dokumen	NA									
	<b>Indeks Reformasi Publik</b>		√		NA	NA	NA	NA		NA									
	<b>Nilai Evaluasi SAKIP</b>		√		NA	NA	NA	NA	80.15	NA									

	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur</b>		√		NA	NA	NA	NA	100%	NA									
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan		√		NA	NA	NA	NA	100%	NA									
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		√		NA	NA	NA	NA	9 dokumen	NA									
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		√		NA	NA	NA	NA	144 laporan	NA									
	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu		√		NA	NA	NA	NA	100%	NA									
	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		√		NA	NA	NA	NA	100%	NA									
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan		√		NA	NA	NA	NA	100%	NA									
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		√		NA	NA	NA	NA	28 orang/bulan	NA									
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		√		NA	NA	NA	NA	300 dokumen	NA									

	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		√		NA	NA	NA	NA	14 laporan	NA									
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawainan		√		NA	NA	NA	NA	0%	NA									
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		√		NA	NA	NA	NA	0	NA									
	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		√		NA	NA	NA	NA	100%	NA									
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		√		NA	NA	NA	NA	6 Paket	NA									
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan		√		NA	NA	NA	NA	61 Paket	NA									
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		√		NA	NA	NA	NA	4 Paket	NA									
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		√		NA	NA	NA	NA	6 bhq]	NA									
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		√		NA	NA	NA	NA	8 Paket	NA									
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		√		NA	NA	NA	NA	12 Dokumen	NA									
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		√		NA	NA	NA	NA	624 Dokumen	NA									
	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur		√		NA	NA	NA	NA	0%	NA									

	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		√		NA	NA	NA	NA	0 unit	NA									
	Persentase pemenuhan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah		√		NA	NA	NA	NA	100%	NA									
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		√		NA	NA	NA	NA	12 laporan	NA									
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		√		NA	NA	NA	NA	12 laporan	NA									
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan		√		NA	NA	NA	NA	12 laporan	NA									
	Persentase Barang milik Daerah dalam kondisi baik		√		NA	NA	NA	NA	100%	NA									
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		√		NA	NA	NA	NA	1 unit	NA									
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		√		NA	NA	NA	NA	5 Unit	NA									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		√		NA	NA	NA	NA	145 Unit	NA									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		√		NA	NA	NA	NA	0	NA									

Pencapaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk tahun 2021 ditandai dengan implementasi dari perubahan rencana strategis tahun 2018-2023. Adapun berikut merupakan analisa keberhasilan dan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja tahun 2021:

1. Pada tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meraih nilai IKM sebesar **93,29 (SANGAT BAIK)**. Nilai tersebut berhasil melampaui nilai yang ditargetkan yaitu sebesar **84,25** sehingga capaian yang diraih adalah sebesar **110.73%**. Oleh karena itu, pencapaian target kinerja dari indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat tergolong **BERHASIL**. Keberhasilan pencapaian target ini didukung dengan komitmen seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk terus berbenah dan bereformasi sehingga seluruh aspek penilaian dalam Survei Kepuasan Masyarakat dapat mendapatkan hasil maksimal.
  - a. **Syarat**. Nilai IKM pada komponen ini adalah sebesar 95. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat secara umum telah merasa puas terhadap kemudahan dan penyampaian informasi persyaratan pelayanan administrasi kependudukan. Persyaratan pengajuan penerbitan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Persyaratan juga

telah dilakukan publikasi melalui leaflet, website dan media sosial.

- b. **Prosedur.** Nilai IKM untuk komponen ini adalah 93.26. Dengan begitu, masyarakat umum dianggap telah puas dengan kemudahan prosedur pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Prosedur pelayanan administrasi kependudukan telah dibakukan dan dituangkan dalam Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan telah dipublikasikan melalui leaflet, website dan media sosial.
- c. **Waktu.** Nilai IKM pada komponen ini adalah sebesar 91.16 sehingga masyarakat umum dianggap telah puas dengan jangka waktu pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

**Tabel 2.5. Jangka Waktu Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang**

NO	JENIS PELAYANAN	JANGKA WAKTU PELAYANAN (HARI KERJA)
1	Pelayanan KK	3 HARI
2	Pelayanan KTP	1 JAM
3	Pelayanan KIA	1 JAM
4	Pelayanan Surat Pindah	1 HARI

5	Pelayanan Surat Kedatangan	1 HARI
6	Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran	4 HARI
7	Pelayanan Pencatatan Akta Kematian	4 HARI
8	Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan	1 HARI
9	Pelayanan Pencatatan Akta Perceraian	3 HARI
10	Pelayanan Perubahan Akta	10 HARI
11	Pelayanan Pengaduan	1 HARI

- d. **Biaya.** Nilai IKM tertinggi berada pada komponen biaya, yaitu sebesar 97.26. Seluruh pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tidak dipungut biaya.
- e. **Hasil.** Nilai IKM pada komponen ini adalah sebesar 92.74. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat secara umum telah puas terhadap spesifikasi jenis pelayanan karena masyarakat telah mendapatkan atau mengetahui jenis layanan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan kesesuaiannya terhadap kebutuhan masyarakat.
- f. **Kompetensi.** Nilai IKM pada komponen ini adalah sebesar 93.91. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat secara umum telah merasa puas dengan kompetensi pelaksana pelayanan. Peningkatan kompetensi petugas pelaksana

pelayanan dilaksanakan melalui bimtek internal terkait dengan pelaksanaan teknis dan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.

**g. Perilaku**. Nilai IKM untuk komponen ini adalah sebesar 91.76 dimana masyarakat secara umum merasa puas terhadap perilaku pelaksana petugas pelayanan baik dalam hal kesopanan maupun kecakapan teknis petugas.

**h. Sarana dan Prasarana**. Nilai IKM untuk komponen ini adalah sebesar 92.29 dimana sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi kependudukan sudah dianggap masuk dalam kategori sangat baik.

**i. Sarana Pengaduan**. Nilai IKM untuk komponen ini adalah 93.28 dimana masyarakat umum dianggap sudah puas dengan prosedur pengaduan dan juga kecepatan tindak lanjut dari pengaduan tersebut. Pengaduan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang bisa disampaikan melalui media whatsapp, email, media sosial dan telepon.

2. Pada tahun 2021, nilai Indeks Pelayanan Publik yang berhasil dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang adalah sebesar **4,128** dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar **3,98** sehingga capaiannya sebesar **103,72%**. Dari perolehan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencapaian target untuk indikator sasaran strategis Indeks

Pelayanan Publik telah **BERHASIL** dicapai. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Peningkatan kualitas dan publikasi dari Standar Pelayanan dan SOP di seluruh platform, baik melalui offline (banner di ruang tunggu, sosialisasi, media massa, dll.) maupun online (media sosial, whatsapp, dan website);
- b. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan melalui Bimtek Internal, penerapan Kode Etik Pelayanan dan pemberian penghargaan dan sanksi bagi karyawan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
- c. Melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan. Mulai dari ruang tunggu dengan fasilitas lengkap (televisi, bahan bacaan, monitor antrian, AC, air minum, dll), pembangunan arena bermain untuk anak, ruang laktasi yang nyaman bagi ibu menyusui, menyediakan layanan konsultasi dan informasi serta layanan pengaduan yang mudah diakses hingga menyediakan jalan dan loket khusus serta kursi roda bagi penyandang disabilitas;
- d. SIPP telah tersedia secara online di website [www.jombangkab.go.id](http://www.jombangkab.go.id) dan selalu diupdate tiap ada informasi pelayanan terbaru;
- e. Menyediakan sarana dan petugas khusus untuk layanan pengaduan. Saluran pengaduan dibuka melalui offline dengan

langsung datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dan online melalui media Whatsapp, Instagram, Facebook dan Email. Seluruh pengaduan akan ditindaklanjuti oleh petugas pengaduan;

f. Selalu mengembangkan inovasi-inovasi terbaru demi kelancaran pelayanan administrasi kependudukan. Adapun inovasi-inovasi tersebut antara lain:

- BESUTAN (Berikan Pelayanan Khusus Terpadu Adminduk);
- CAK DULADI (Cetak Akta Duduk Langsung Jadi);
- RESTUNYA DIAH (Rekam Sebelum Tujuhbelas Tahun Nyaman di Sekolah);
- PAK KIAI SALEH (Pelayanan Cetak KIA Kerjasama dengan Sekolah);
- SISCA MANIS (Sistem Scan Lima Menit Selesai);
- CAK NGATESO (Cetak Pengajuan Teko Deso);
- NING YAONAH/ [www.dukcapil.jombangkab.go.id](http://www.dukcapil.jombangkab.go.id) (Nikmatnya Ngantri Pelayanan Online di Rumah);
- Pelayanan *Three In One* (Pindah Datang Penduduk di Kabupaten Jombang).

3. Realisasi kinerja untuk indikator sasaran strategis Nilai Evaluasi SAKIP pada tahun 2021 adalah **80,44**. Dari target **80,25**, maka

capaian dari indikator tersebut adalah sebesar **100,36%**.

Berdasarkan hal tersebut, maka target kinerja untuk indikator Nilai Evaluasi SAKIP telah **BERHASIL** dicapai. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - b. Meningkatkan koordinasi dengan bidang-bidang sehingga budaya SAKIP di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dapat terwujud;
  - c. Memastikan keakuratan data pada setiap dokumen, baik dokumen perencanaan, pelaporan hingga evaluasi;
  - d. Melaksanakan rekomendasi dari hasil evaluasi tim penilai SAKIP pada tahun sebelumnya;
4. Capaian kinerja untuk indikator persentase cakupan penerbitan KK adalah sebesar **137.75%** yang diperoleh dari nilai realisasi sebesar **122.60%** dibanding target sebesar **89%**. Pencapaian target kinerja **BERHASIL**. Keberhasilan pencapaian target ini didukung dengan koordinasi dengan Kecamatan yang berjalan dengan baik. Pelayanan KK dilaksanakan di Kecamatan, dimana operator melakukan scan terhadap berkas pemohon untuk dilakukan pencetakan. Setelah dicetak KK didistribusikan ke Kecamatan untuk dibagikan ke masyarakat. Dengan adanya pandemi,

penyebaran pelayanan KK di Kecamatan lebih ditingkatkan melalui upgrade aplikasi dan kualitas SDM;

5. Capaian kinerja untuk indikator persentase cakupan penerbitan KTP el adalah sebesar **104,13%** yang diperoleh dari nilai realisasi sebesar **97,88%** dibanding target sebesar **94%**. Target tersebut telah **BERHASIL** dicapai pada tahun **2021**. Keberhasilan pencapaian target didukung dengan adanya pelayanan online melalui website [www.dukcapil.jombangkab.go.id](http://www.dukcapil.jombangkab.go.id) yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pengajuan penerbitan KTP el. Pelayanan juga bisa dilakukan melalui kecamatan sejak pandemi COVID 19. Selain memecah kerumunan antrian, penyebaran pelayanan KTP el di kecamatan juga bertujuan untuk mendekatkan pelayanan ke kecamatan, sehingga masyarakat tidak perlu berbondong-bondong ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
6. Capaian kinerja untuk indikator persentase penerbitan KIA adalah sebesar **136,94%** yang diperoleh dari nilai realisasi sebesar **50,67%** dibanding target sebesar **37%**. Target pencetakan KIA untuk tahun 2021 **BERHASIL** dicapai. Pencapaian target didukung dengan adanya koordinasi yang berjalan dengan baik antara Dispendukcapil Jombang dengan Dnas Pendidikan dan Kementerian Agama. Penerbitan KIA dilaksanakan melalui kerjasama dengan sekolah-sekolah yang didampingi oleh Dinas

Pendidikan dan Kementerian Agama. Akan tetapi karena adanya pandemi COVID 19 sehingga mengakibatkan sekolah tutup sehingga loket pelayanan KIA juga mulai dibuka untuk umum. Pelayanan pengajuan KIA juga bisa diakses melalui website [www.dukcapil.jombangkab.go.id](http://www.dukcapil.jombangkab.go.id). Selain itu bagi pemohon penerbitan Akta Kelahiran bagi bayi baru lahir secara otomatis akan mendapat KIA;

7. Capaian kinerja untuk indikator persentase cakupan penerbitan Akta Kelahiran adalah sebesar **95,10%** yang diperoleh dari nilai realisasi sebesar 90,34% dibanding target sebesar **95%** sehingga pencapaian target di tahun 2021 **BELUM BERHASIL** dicapai. Target belum bisa dicapai karena terkendala data akta kelahiran yang belum konsolidasi dengan pusat[
8. Capaian kinerja untuk indikator persentase perjanjian kerjasama pemanfaatan data administrasi kependudukan adalah sebesar **107,23%** yang diperoleh dari nilai realisasi sebesar **26,83%** dibanding target sebesar **25%**. Target kinerja **BERHASIL** dicapai pada tahun 2021. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh kebutuhan data kependudukan bagi Perangkat Daerah lain demi menunjang pelayanan publik yang diampu oleh Perangkat Daerah tersebut;
9. Capaian kinerja untuk indikator persentase pelaporan data administrasi kependudukan adalah sebesar 100% yang diperoleh

dari nilai realisasi sebesar 100% dibanding target sebesar 100% sehingga pada tahun 2021 target digolongkan **BERHASIL** dicapai. Pencapaian target tersebut didukung dengan pengiriman laporan kependudukan yang tepat waktu ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta ke Provinsi. Selain itu permohonan data kependudukan oleh Perangkat Daerah lain juga selalu dipenuhi;

10. Capaian kinerja untuk indikator persentase inovasi pelayanan yang diterapkan adalah sebesar **100%** yang diperoleh dari nilai realisasi sebesar **100%** dibanding target sebesar **100%** sehingga pencapaian target kinerja tergolong **BERHASIL**. Dengan adanya pandemi COVID 19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dituntut untuk selalu berinovasi agar pelayanan bisa mudah didapatkan masyarakat walaupun di tengah situasi pandemi;

11. Capaian kinerja untuk indikator persentase rata-rata capaian kinerja aparatur adalah sebesar **122.38%** yang diperoleh dari nilai realisasi sebesar **122.38%** dibanding target sebesar **100%** sehingga pencapaian target untuk indikator ini tergolong **BERHASIL**.

12. Capaian kinerja untuk indikator persentase rata-rata capaian kinerja aparatur adalah sebesar **100%** yang diperoleh dari nilai realisasi sebesar **100%** dibanding target sebesar **100%** sehingga pencapaian target untuk indikator ini tergolong **BERHASIL**. Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang pelayanan administrasi

kependudukan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus  
Non Fisik.

**Tabel 2.6.**  
**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Jombang**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke (Rp,)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke (Rp,)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>RENSTRA 2018-2023</b>																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,905,327,375	1,823,167,725	NA	NA	NA	3,659,301,663	1,754,004,117	NA	NA	NA	94%	96%	NA	NA	NA	-53%	-52%
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,905,327,375	1,823,167,725	NA	NA	NA	3,659,301,663	1,754,004,117	NA	NA	NA	94%	96%	NA	NA	NA	-53%	-52%
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1,558,490,000	723,895,200	NA	NA	NA	1,429,261,327	678,510,250	NA	NA	NA	92%	94%	NA	NA	NA	-54%	-53%
Pengadaan Sarana Dan Prasarana gedung kantor	1,331,250,000	471,315,200	NA	NA	NA	1,228,200,256	456,697,600	NA	NA	NA	92%	97%	NA	NA	NA	-65%	-63%

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/b erat gedung kantor/bangunan pendukungnya	41,240,000	145,630,000	NA	NA	NA	36,503,100	124,204,000	NA	NA	NA	89%	85%	NA	NA	NA	253%	240%
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/b erat sarana dan prasarana gedung kantor	116,000,000	78,300,000	NA	NA	NA	82,947,271	75,163,225	NA	NA	NA	72%	96%	NA	NA	NA	-33%	-9%
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/b erat sarana dinas/kendaraan operasional	70,000,000	28,650,000	NA	NA	NA	21,610,700	22,445,425	NA	NA	NA	31%	78%	NA	NA	NA	-59%	4%
<b>Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD</b>	<b>36,500,000</b>	<b>29,999,900</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>31,696,000</b>	<b>29,597,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>87%</b>	<b>99%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>-18%</b>	<b>-7%</b>
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	20,000,000	19,999,900	NA	NA	NA	19,556,000	19,882,000	NA	NA	NA	98%	99%	NA	NA	NA	0%	2%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	11,500,000	5,000,000	NA	NA	NA	11,460,000	4,955,000	NA	NA	NA	100%	99%	NA	NA	NA	-57%	-57%
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	5,000,000	5,000,000	NA	NA	NA	6,800,000	4,760,000	NA	NA	NA	136%	95%	NA	NA	NA	0%	-30%
<b>Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>131,661,600</b>	<b>81,391,500</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>131,325,274</b>	<b>80,620,591</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>-38%</b>	<b>-39%</b>

Pelayanan Pendaftaran Penduduk,	87,411,600	51,006,000	NA	NA	NA	87,180,274	50,712,791	NA	NA	NA	100%	99%	NA	NA	NA	-42%	-42%
Pelayanan Pendaftaran Pindah Datang Penduduk	9,900,000	6,466,000	NA	NA	NA	9,850,000	6,403,200	NA	NA	NA	99%	99%	NA	NA	NA	-35%	-35%
Pelayanan Pendataan Penduduk	34,350,000	239,191,500	NA	NA	NA	34,295,000	23,504,600	NA	NA	NA	100%	10%	NA	NA	NA	596%	-31%
<b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>124,800,000</b>	<b>50,396,500</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>114,786,269</b>	<b>42,397,350</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>92%</b>	<b>84%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>-60%</b>	<b>-63%</b>
Pelayanan Pencatatan Kelahiran	107,640,000	27,391,000	NA	NA	NA	99,546,676	22,661,150	NA	NA	NA	92%	83%	NA	NA	NA	-75%	-77%
Peningkatan Data Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	7,800,000	11,095,500	NA	NA	NA	6,252,760	10,270,000	NA	NA	NA	80%	93%	NA	NA	NA	42%	64%
Peningkatan Pelayanan Perubahan Akta-Akta Pencatatan Sipil	9,360,000	11,910,000	NA	NA	NA	8,986,833	9,466,200	NA	NA	NA	96%	79%	NA	NA	NA	27%	5%
<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>172,850,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>167,613,218</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>97%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	102,400,000	NA	NA	NA	NA	100,981,310	NA	NA	NA	NA	99%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Pemanfaatan Data oleh Instansi dan Masyarakat	23,425,000	NA	NA	NA	NA	21,732,300	NA	NA	NA	NA	93%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Penerbitan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	42,025,000	NA	NA	NA	NA	44,899,608	NA	NA	NA	NA	107%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>NA</b>	<b>15,760,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>13,203,700</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>84%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	NA	9,350,000	NA	NA	NA	NA	7,150,000	NA	NA	NA	NA	76%	NA	NA	NA	NA	NA
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	NA	-	NA	NA	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA	0%	NA	NA	NA	NA	0%
Penyebarluasan Informasi Administrasi Kependudukan	NA	6,410,000	NA	NA	NA	NA	6,053,700	NA	NA	NA	NA	94%	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan</b>	<b>NA</b>	<b>15,760,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>13,203,700</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>84%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

Pemanfaatan Data oleh Instansi dan Masyarakat	NA	2,480,000	NA	NA	NA	NA	2,375,000	NA	NA	NA	NA	96%	NA	NA	NA	NA	NA
Penerbitan Kerjasama Pemanfaatan Data	NA	11,355,000	NA	NA	NA	NA	11,101,700	NA	NA	NA	NA	98%	NA	NA	NA	NA	NA
Inoasi Pelayanan	NA	4,585,000	NA	NA	NA	NA	4,575,000	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Program Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>3,519,985,000</b>	<b>4,162,454,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>3,065,980,672</b>	<b>3,796,276,648</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>87%</b>	<b>91%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>18%</b>	<b>24%</b>
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,399,985,000	4,162,454,000	NA	NA	NA	2,981,585,872	3,796,276,648	NA	NA	NA	88%	91%	NA	NA	NA	22%	27%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat SIAK	120,000,000	NA	NA	NA	NA	84,394,800	NA	NA	NA	NA	70%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 (I)</b>																	
<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>536,182,200</b>	<b>392,029,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>535,977,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>99.96%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>-27%</b>	<b>NA</b>
<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>536,182,200</b>	<b>392,029,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>535,977,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>99.96%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>-27%</b>	<b>NA</b>

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	NA	NA	516,982,200	306,779,000	NA	NA	NA	516,777,000	NA	NA	NA	NA	99.96%	NA	NA	-41%	NA
Pencatatan, Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	NA	NA	9,300,000	22,000,000	NA	NA	NA	9,300,000	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA	137%	NA
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	NA	NA	9,900,000	63,250,000	NA	NA	NA	9,900,000	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA	539%	NA
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	NA	NA	85,222,800	132,187,900	NA	NA	NA	101,199,900	NA	NA	NA	NA	118.75%	NA	NA	55%	NA
	NA	NA	22,909,000	38,881,000	NA	NA	NA	20,112,000	NA	NA	NA	NA	87.79%	NA	NA	70%	NA
Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	NA	NA	20,443,900	50,967,000	NA	NA	NA	40,886,000	NA	NA	NA	NA	199.99%	NA	NA	149%	NA
	NA	NA	18,325,000	19,476,000	NA	NA	NA	16,582,000	NA	NA	NA	NA	90.49%	NA	NA	6%	NA

Pengolahan dan penyajian data kependudukan	NA	NA	20,443,900	50,967,000	NA	NA	NA	40,886,000	NA	NA	NA	NA	199.99%	NA	NA	149%	NA
Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	NA	NA	18,325,000	19,476,000	NA	NA	NA	16,582,000	NA	NA	NA	NA	90.49%	NA	NA	6%	NA
<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Administrasi Kependudukan</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>20,443,900</b>	<b>24,683,900</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>20,274,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>99.17%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>21%</b>	<b>NA</b>
Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	NA	NA	20,443,900	24,683,900	NA	NA	NA	20,274,000	NA	NA	NA	NA	99.17%	NA	NA	21%	NA
<b>Penyelenggaraan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>44,335,000</b>	<b>56,537,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>40,039,900</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>90.31%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>28%</b>	<b>NA</b>
	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>4,584,000</b>	<b>19,405,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>3,530,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>77.01%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>323%</b>	<b>NA</b>
Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	NA	NA	44,335,000	56,537,000	NA	NA	NA	40,039,900	NA	NA	NA	NA	90.31%	NA	NA	28%	NA
Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	NA	NA	4,584,000	19,405,000	NA	NA	NA	3,530,000	NA	NA	NA	NA	77.01%	NA	NA	323%	NA
<b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>17,110,000</b>	<b>21,381,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>15,626,126</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>91.33%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>25%</b>	<b>NA</b>

<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>17,110,000</b>	<b>21,381,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>15,626,126</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>91.33%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>25%</b>	<b>NA</b>
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	NA	NA	17,110,000	21,381,000	NA	NA	NA	15,626,126	NA	NA	NA	NA	91.33%	NA	NA	25%	NA
<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>68,648,500</b>	<b>123,804,500</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>62,299,988</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>90.75%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>80%</b>	<b>NA</b>
<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>48,513,500</b>	<b>59,035,500</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>44,058,988</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>90.82%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>22%</b>	<b>NA</b>
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	NA	NA	48,513,500	59,035,500	NA	NA	NA	44,058,988	NA	NA	NA	NA	90.82%	NA	NA	22%	NA
<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>20,135,000</b>	<b>64,769,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>18,241,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>90.59%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>222%</b>	<b>NA</b>
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	NA	NA	9,141,000	31,787,000	NA	NA	NA	8,943,000	NA	NA	NA	NA	97.83%	NA	NA	248%	NA
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	NA	NA	10,994,000	32,982,000	NA	NA	NA	9,298,000	NA	NA	NA	NA	84.57%	NA	NA	200%	NA

<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	NA	NA	9,696,655,373	13,504,225,080	NA	NA	NA	8,035,032,593	NA	NA	NA	NA	82.86%	NA	NA	39%	NA
<b>Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah</b>	NA	NA	37,080,000	161,877,000	NA	NA	NA	36,620,500	NA	NA	NA	NA	98.76%	NA	NA	337%	NA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	NA	33,180,000	136,527,000	NA	NA	NA	32,963,000	NA	NA	NA	NA	99.35%	NA	NA	311%	NA
Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	NA	NA	3,900,000	25,350,000	NA	NA	NA	3,657,500	NA	NA	NA	NA	93.78%	NA	NA	550%	NA
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	NA	NA	5,323,132,053	5,049,950,080	NA	NA	NA	4,109,696,456	NA	NA	NA	NA	77.20%	NA	NA	-5%	NA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	NA	NA	5,318,132,053	4,897,050,080	NA	NA	NA	4,104,826,656	NA	NA	NA	NA	77.19%	NA	NA	-8%	NA
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	NA	NA	-	147,825,000	NA	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA	0.00%	NA	NA	0%	NA

Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	NA	NA	5,000,000	5,075,000	NA	NA	NA	4,869,800	NA	NA	NA	NA	97.40%	NA	NA	2%	NA
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>66,230,000</b>	<b>1,061,560,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>66,200,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>99.95%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>1503%</b>	<b>NA</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	NA	NA	-	996,560,000	NA	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA	0.00%	NA	NA	#DIV/0!	NA
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	NA	NA	66,230,000	65,000,000	NA	NA	NA	66,200,000	NA	NA	NA	NA	99.95%	NA	NA	-2%	NA
<b>Administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>540,307,500</b>	<b>1,446,575,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>497,757,674</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>92.12%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>168%</b>	<b>NA</b>
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	NA	NA	12,760,000	12,760,000	NA	NA	NA	12,102,274	NA	NA	NA	NA	94.85%	NA	NA	0%	NA
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	NA	NA	149,580,000	295,580,000	NA	NA	NA	145,703,000	NA	NA	NA	NA	97.41%	NA	NA	98%	NA
Penyediaan peralatan Rumah Tangga	NA	NA	1,526,000	1,526,000	NA	NA	NA	1,526,000	NA	NA	NA	NA	100.00%	NA	NA	0%	NA
Penyediaan bahan logistik kantor	NA	NA	224,220,000	257,230,000	NA	NA	NA	189,385,500	NA	NA	NA	NA	84.46%	NA	NA	15%	NA
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	NA	NA	88,263,500	727,310,000	NA	NA	NA	85,359,900	NA	NA	NA	NA	96.71%	NA	NA	724%	NA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	NA	NA	4,070,000	4,070,000	NA	NA	NA	3,800,000	NA	NA	NA	NA	93.37%	NA	NA	0%	NA
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	NA	NA	59,888,000	148,099,000	NA	NA	NA	59,881,000	NA	NA	NA	NA	99.99%	NA	NA	147%	NA
<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>2,255,081,100</b>	<b>4,220,617,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>2,022,085,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>89.67%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>87%</b>	<b>NA</b>
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	NA	NA	2,255,081,100	4,220,617,000	NA	NA	NA	2,022,085,000	NA	NA	NA	NA	89.67%	NA	NA	87%	NA
<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>917,761,720</b>	<b>1,089,985,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>812,449,844</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>88.53%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>19%</b>	<b>NA</b>
Penyediaan jasa surat menyurat	NA	NA	18,961,720	43,360,000	NA	NA	NA	15,643,720	NA	NA	NA	NA	82.50%	NA	NA	129%	NA
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	NA	NA	186,000,000	186,000,000	NA	NA	NA	148,806,124	NA	NA	NA	NA	80.00%	NA	NA	0%	NA
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	NA	NA	712,800,000	860,625,000	NA	NA	NA	648,000,000	NA	NA	NA	NA	90.91%	NA	NA	21%	NA

<b>Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	NA	NA	557,063,000	473,661,000	NA	NA	NA	490,223,119	NA	NA	NA	NA	88.00%	NA	NA	-15%	NA
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Jabatan	NA	NA	71,510,000	20,600,000	NA	NA	NA	58,346,983	NA	NA	NA	NA	81.59%	NA	NA	-71%	NA
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	NA	NA	166,470,000	94,978,000	NA	NA	NA	142,751,236	NA	NA	NA	NA	85.75%	NA	NA	-43%	NA
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	NA	NA	319,083,000	233,083,000	NA	NA	NA	289,124,900	NA	NA	NA	NA	90.61%	NA	NA	-27%	NA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	NA	NA	-	125,000,000	NA	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA	0.00%	NA	NA	0%	NA
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	NA	NA	2,709,877,000	NA	NA	NA	NA	2,397,838,202	NA	NA	NA	NA	88.49%	NA	NA	NA	NA
<b>Administrasi umum Perangkat Daerah</b>	NA	NA	2,516,672,000	NA	NA	NA	NA	2,230,283,202	NA	NA	NA	NA	88.62%	NA	NA	NA	NA

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	NA	NA	1,829,578,000	NA	NA	NA	NA	1,547,380,850	NA	NA	NA	NA	84.58%	NA	NA	NA	NA
Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	NA	NA	39,000,000	NA	NA	NA	NA	35,600,000	NA	NA	NA	NA	91.28%	NA	NA	NA	NA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	NA	648,094,000	NA	NA	NA	NA	647,302,352	NA	NA	NA	NA	99.88%	NA	NA	NA	NA
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>-</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>-</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>0.00%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA	0.00%	NA	NA	NA	NA
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>193,205,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>167,555,000</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>86.72%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	NA	193,205,000	NA	NA	NA	NA	167,555,000	NA	NA	NA	NA	86.72%	NA	NA	NA	NA
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>-</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>-</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>0.00%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA	0.00%	NA	NA	NA	NA

**PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 (II)**

<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	NA	NA	NA	NA	97,100,000	NA											
<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	NA	NA	NA	NA	97,100,000	NA											
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	NA	NA	NA	NA	97,100,000	NA											
Pencatatan, Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	NA	NA	NA	NA	-	NA											
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	NA	NA	NA	NA	-	NA											
<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	NA	NA	NA	NA	65,714,400	NA											
	NA	NA	NA	NA	10,947,500	NA											
<b>Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database</b>	NA	NA	NA	NA	11,031,000	NA											

<b>kependudukan</b>	NA	NA	NA	NA	5,255,500	NA											
Pengolahan dan penyajian data kependudukan	NA	NA	NA	NA	11,031,000	NA											
Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	NA	NA	NA	NA	5,255,500	NA											
<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Administrasi Kependudukan</b>	NA	NA	NA	NA	29,421,400	NA											
Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	NA	NA	NA	NA	25,200,000	NA											
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	NA	NA	NA	NA	4,221,400	NA											
<b>Penyelenggaraan Pengelolaan informasi</b>	NA	NA	NA	NA	25,262,000	NA											

<b>administrasi kependudukan</b>	NA	NA	NA	NA	5,692,000	NA											
Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	NA	NA	NA	NA	25,262,000	NA											
Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	NA	NA	NA	NA	5,692,000	NA											
<b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	NA	NA	NA	NA	29,883,500	NA											
<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	NA	NA	NA	NA	29,883,500	NA											
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	NA	NA	NA	NA	29,883,500	NA											
<b>Program Pencatatan Sipil</b>	NA	NA	NA	NA	79,940,600	NA											
<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	NA	NA	NA	NA	76,128,500	NA											

Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	NA	NA	NA	NA	76,128,500	NA											
<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>3,812,100</b>	<b>NA</b>											
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	NA	NA	NA	NA	2,582,000	NA											
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	NA	NA	NA	NA	1,230,100	NA											
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>18,839,537,597</b>	<b>NA</b>											
<b>Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>17,777,550</b>	<b>NA</b>											
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA	2,249,750	NA											

Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	NA	NA	NA	NA	15,527,800	NA											
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>5,320,530,597</b>	<b>NA</b>											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	NA	NA	NA	NA	5,191,760,797	NA											
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	NA	NA	NA	NA	127,770,000	NA											
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	NA	NA	NA	NA	999,800	NA											
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>-</b>	<b>NA</b>											
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	NA	NA	NA	NA	-	NA											
<b>Administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>12,263,014,150</b>	<b>NA</b>											
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	NA	NA	NA	NA	12,750,600	NA											
Penyediaan peralatan dan perlengkapan	NA	NA	NA	NA	11,699,691,500	NA											

kantor																	
Penyediaan peralatan Rumah Tangga	NA	NA	NA	NA	-	NA											
Penyediaan bahan logistik kantor	NA	NA	NA	NA	120,482,100	NA											
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	NA	NA	NA	NA	337,904,050	NA											
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	NA	NA	NA	NA	4,704,000	NA											
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	NA	NA	NA	NA	87,481,900	NA											
<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>-</b>	<b>NA</b>											
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	NA	NA	NA	NA	-	NA											
<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>905,350,000</b>	<b>NA</b>											
Penyediaan jasa surat menyurat	NA	NA	NA	NA	57,150,000	NA											
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	NA	NA	NA	NA	175,000,000	NA											

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	NA	NA	NA	NA	673,200,000	NA											
<b>Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>332,865,300</b>	<b>NA</b>											
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Jabatan	NA	NA	NA	NA	42,110,000	NA											
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	NA	NA	NA	NA	85,800,000	NA											
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	NA	NA	NA	NA	204,955,300	NA											
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	NA	NA	NA	NA	-	NA											

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sebagai satuan layanan masyarakat dituntut untuk terus meningkatkan kinerja terutama dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat setiap tahunnya. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan didukung oleh sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan hal tersebut maka analisis pemenuhan dan penggunaan sumber daya sangat diperlukan.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Efisiensi merupakan bentuk penghematan terhadap anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian kinerja. Efisiensi didapat dari rata-rata capaian kinerja dikurangi persentase realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Adapun realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp. 11.361.028.047,- atau sebesar 85,23% dari pagu anggaran sebesar Rp. 13.329.462.253,-. Sedangkan rata-rata capaian kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang adalah sebesar 117,65%. Dengan demikian efisiensi anggaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang adalah sebesar **32,42%** yang didapat dari rata-rata capaian kinerja dikurangi realisasi anggaran tahun 2021.

Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian target di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang telah **TERCAPAI**. Tingkat efisiensi tersebut meningkat sebanyak 10,64% dari efisiensi tahun lalu yang sebesar 21,78%.

Peningkatan efisiensi pada tahun 2021 tidak lepas dari usaha Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yang terus berbenah diri melalui inovasi-inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari:

1. BESUTAN (Berikan Pelayanan Khusus Terpadu Adminduk);
2. CAK DULADI (Cetak Akta Duduk Langsung Jadi);
3. RESTUNYA DIAH (Rekam Sebelum Tujuhbelas Tahun Nyaman di Sekolah);
4. PAK KIAI SALEH (Pelayanan Cetak KIA Kerjasama dengan Sekolah);
5. SISCA MANIS (Sistem Scan Lima Menit Selesai);
6. CAK NGATESO (Cetak Pengajuan Teko Deso);
7. NING YAONAH/ [www.dukcapil.jombangkab.go.id](http://www.dukcapil.jombangkab.go.id) (Nikmatnya Ngantri Pelayanan Online di Rumah);

#### 8. Pelayanan Three In One (Pindah Datang Penduduk di Kabupaten Jombang).

Implementasi inovasi-inovasi tersebut dapat mendorong kenaikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dengan mempermudah dan memperpendek jarak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang setara. Selain itu dukungan sarana dan prasarana berupa printer KK dan KTP el yang selalu berada dalam kondisi baik juga mendukung dalam menghasilkan produk layanan yang berkualitas.

Pelayanan administrasi kependudukan secara online juga terus digalakkan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pengajuan dokumen kependudukan dan sebagai salah satu upaya untuk menghindari kerumunan antrian di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Selain itu pelayanan administrasi kependudukan juga semakin didekatkan kepada masyarakat melalui pelayanan di kecamatan (SISCA MANIS), desa (CAK NGATESO), dan jemput bola (CAK DULADI, Besutan, PAK KIAI SALEH). Sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi operator di Kecamatan dan desa juga ditingkatkan melalui Bimbingan Teknis dan sosialisasi.

Koordinasi dengan Kecamatan terkait dengan proses pelayanan permohonan pencetakan KK dan KTP el semakin berjalan lancar setelah masing-masing Kecamatan diberikan alat *scanner* dan alat cetak KK dan

KTP el untuk memudahkan Kecamatan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan langsung kepada masyarakat. Pemberian alat tersebut juga untuk mendukung pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan di kecamatan, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

Efisiensi juga tercapai dengan dukungan sumber daya manusia yang cukup. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang hingga tanggal 31 Desember 2019 memiliki 68 karyawan yang terdiri dari 32 karyawan berstatus PNS dan 36 karyawan berstatus tenaga non PNS. Jumlah karyawan tersebut berhasil membawa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang mencapai efisiensi dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu adanya identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

### 2.4.1. Faktor Internal

#### 1. Kekuatan

- a. Adanya Perda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- b. Adanya dasar hukum pembentukan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Adanya RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Adanya komitmen dari aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
- e. Dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program kependudukan dan pencatatan sipil
- f. Program SIAK mampu memberikan Identitas Tunggal secara Nasional berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan)
- g. Sudah memiliki database kependudukan dalam SIAK
- h. Mendekatkan pelayanan Administrasi Kependudukan ke tingkat Kecamatan

#### 2. Kelemahan

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Administrasi Kependudukan
- c. Terbatasnya penguasaan teknologi informasi

- d. Pengelolaan arsip yang masih kurang memadai

#### **2.4.2. Faktor Eksternal**

##### **1. Peluang**

- a. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah untuk diakses
- b. Dokumen Kependudukan menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum
- c. Adanya Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan pelaksanaannya
- d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tertib Administrasi Kependudukan
- e. Adanya pemangku kepentingan (stake holder) yang mensyaratkan dokumen kependudukan.

##### **2. Ancaman**

- a. Mobilitas penduduk yang tinggi
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya Administrasi Kependudukan
- c. Kompleksitas permasalahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat akan tertib Administrasi Kependudukan
- e. Kurangnya koordinasi antar lembaga/ lintas OPD terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan

### **2.4.3. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan**

Dari analisis faktor internal dan eksternal tersebut didapatkan faktor-faktor kunci penentu keberhasilan pengembangan pelayanan Administrasi Kependudukan yang terdiri dari:

- a. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan
- b. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- c. Termanfaatkannya RENSTRA sebagai acuan untuk pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA)
- d. Tersedianya hubungan kerja untuk perencanaan pembangunan yang partisipatif
- e. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas
- f. Tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan pelaksanaan Administrasi Kependudukan

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Isu-isu strategis perangkat daerah adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan program kegiatan karena dampaknya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang di masa yang akan datang. Kondisi yang dimaksud adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Secara umum, pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sudah cukup baik, namun demikian masih ada beberapa kendala yang menghambat kinerja yaitu :

1. Rendahnya pengetahuan/pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan;
2. Kurangnya tenaga/staf/pegawai (jumlah pegawai tidak seimbang dengan volume pekerjaan);
3. Kurangnya kesadaran penduduk untuk melakukan pelaporan kematian sehingga data kependudukan kurang valid;

4. Terdapat beberapa data yang tidak sama dalam dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk;
5. Belum adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Kecamatan.

Beberapa permasalahan pelayanan terutama yang berkaitan dengan aspek pokok kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.1.**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	2	3
1.	Masyarakat masih harus melalui proses birokrasi yang panjang saat pengajuan penerbitan dokumen kependudukan	Belum adanya fasilitas yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini pendekatan masih hanya sebatas sampai ke Kecamatan	Proses pelayanan yang harus dilalui masyarakat cukup panjang mulai dari tingkat RT, Desa, Kecamatan hingga Dispendukcapil
2.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran yang masih belum mencapai target nasional	Data penerbitan akta kelahiran di daerah tidak sinkron dengan data di pusat karena masih ada data yang belum dikonsolidasikan dengan data pusat	NIK tidak sesuai dengan database

3.	Data kependudukan yang belum terintegrasi dengan Perangkat Daerah lain sehingga proses pemberian bantuan sosial menjadi terhambat	Sinkronisasi data kependudukan untuk kepentingan pemberian bantuan sosial, kartu tani, dan pelayanan publik lainnya	Banyaknya NIK yang tidak bergerak/mutasi
----	---	---	--

Sumber: Matriks Perubahan Renstra Dispendukcapil Jombang 2018-2023

Dengan adanya pandemi COVID-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dituntut untuk menyediakan pelayanan administrasi kependudukan yang dekat dengan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan cita-cita Bupati Jombang untuk semakin mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk mengajukan penerbitan dokumen kependudukan.

Saat ini pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, khususnya penerbitan KK masih dilaksanakan pada tingkat Kecamatan. Beberapa produk pelayanan, misalnya penerbitan KTP-el, akta-akta pencatatan sipil dan surat keterangan pindah/kedatangan dilaksanakan secara online melalui [dukcapil.jombangkab.go.id](http://dukcapil.jombangkab.go.id). Namun pada kenyataannya tidak semua elemen masyarakat mampu untuk mengakses fasilitas tersebut, sehingga

dibutuhkan pelayanan yang dekat dan bisa untuk diakses oleh seluruh masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang mulai membangun sebuah sistem pelayanan administrasi kependudukan pada level desa dimana masyarakat hanya perlu datang ke kantor desa setempat untuk mengajukan penerbitan dokumen kependudukan. Pelayanan di level desa diharapkan dapat menjadi jawaban bagi kemudahan akses pelayanan administrasi kependudukan untuk seluruh elemen masyarakat di masa pandemi COVID 19 saat ini.

Permasalahan selanjutnya adalah cakupan akta kelahiran yang belum mencapai target nasional. Hal tersebut terjadi karena akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan tidak semua sesuai dengan data konsolidasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang menyelenggarakan jemput bola pelayanan akta kelahiran secara intensif untuk penyesuaian data dengan data konsolidasi pusat.

Dalam rangka peningkatan perekonomian pada masa pandemi COVID-19, Pemerintah memberikan program Bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat. Mulai dari pemberian Bantuan Langsung Tunai untuk masyarakat tidak mampu, Prakerja, hingga bantuan UMKM. Seluruh program pemerintah tersebut di disalurkan berdasarkan data

kependudukan yang berbasis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Hal tersebut mengakibatkan perlu adanya data yang bersifat valid sehingga bantuan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan sinkronisasi dan validasi data anomali dan ganda. Data kependudukan yang beberapa tahun tidak ada perubahan akan diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan ke-empat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang adalah: **“Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.”**

Berdasarkan visi yang dibangun, terdapat dua (2) nilai dasar yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan lima tahun ke depan, yakni nilai berkarakter dan nilai berdaya saing. Jombang yang berkarakter dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jombang harus didasari atau dilandasi prinsip kejujuran dan etos kerja sebagai pijakannya. Kepemimpinan yang jujur, amanah, dan tegas akan menjadi teladan bersama bagi masyarakat dalam menjalankan

kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sosial maupun lingkungan kerja. Jombang berkarakter dimaknai pula bahwa jombang sebagai kabupaten yang agamis akan menjadi normanorma dan nilai agama sebagai basis pijakkan pembangunan. Proses pembangunan yang mengedepankan norma dan nilai agama akan menghasilkan kesejahteraan dan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat.

Sedangkan muatan nilai “Berdaya Saing” lebih menunjuk pada basis keunggulan strategis dan mandiri Kabupaten Jombang untuk mampu berkompetisi dan memberi kontribusi kemanfaatan dalam tata relasi regional, nasional, maupun internasional. Semua kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat pemerintahan maupun swasta, dilakukan atas dasar profesionalisme, keahlian, efektivitas dan efisiensi sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas tinggi. Pernyataan visi Kabupaten Jombang tersebut mempunyai pemahaman dengan penjelasan pokok-pokok visi sebagai berikut:

1. **Berkarakter** : Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jombang harus didasari atau dilandasi prinsip kejujuran dan etos kerja sebagai pijakannya. Kepemimpinan yang jujur, amanah, dan tegas akan menjadi teladan bersama bagi masyarakat

dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sosial maupun lingkungan kerja.

Jombang berkarakter dimaknai pula bahwa Jombang sebagai kabupaten yang agamis akan menjadi norma-norma dan nilai agama sebagai basis pijakkan pembangunan. Proses pembangunan yang mengedepankan norma dan nilai agama akan menghasilkan kesejahteraan dan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat. kesejahteraan yang merupakan tujuan utama pembangunan dapat terapai dan dirasakan seluruh masyarakat Jombang, keadilan yang merupakan kebutuhan asasi masyarakat dapat terpenuhi dengan merata.

Bahwa pembangunan daerah di segala bidang yang dilakukan di Kabupaten Jombang pada dasarnya adalah untuk mewujudkan masyarakat Jombang yang memiliki kepribadian sosial, jatidiri, watak sosial, orientasi dan pola pikir sebagai karakter-karakter manusia dan masyarakat yang unggul.

2. **Berdaya Saing :** Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dan setiap produk yang di hasilkan di Kab.Jombang dapat bersaing dengan baik pada level lokal,regional, nasional bahkan internasional.

Semua kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat pemerintahan maupun swasta, dilakukan atas dasar efektivitas dan efisiensi sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas tinggi. Sedangkan setiap produk yang dihasilkan, baik berupa barang maupun jasa, mempunyai daya saing yang tinggi sehingga produk dari Kabupaten Jombang dapat dibanggakan menjadi contoh bagi daerah lain, dengan demikian Kabupaten Jombang akan menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang dapat diperhitungkan dan disejajarkan dengan daerah lain.

Untuk mencapai visi Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 yaitu Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing, maka dirumuskan 3 (tiga) misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

➤ **MISI 1 :** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional;

Misi ini dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari proses

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan

- **MISI 2 :** Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya;

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan karakter masyarakat yang agamis, berbudaya dan berkualitas dalam tatanan sosial masyarakat yang aman, tertib dan damai didukung stabilitas pemerintahan, politik dan sosial budaya.

- **MISI 3 :** Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri

Misi ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan perekonomian daerah melalui upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama Koperasi dan UMKM.

Mengacu pada poin-poin visi misi di atas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan poin misi ke sebagaimana dirinci pada matriks berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang**

Visi : Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing				
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Tujuan PD	Sasaran PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional</b>	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya komunikasi dalam hal edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Administrasi Kependudukan</li> <li>• Peralatan rekam KTP banyak yang rusak.</li> <li>• Blangko KTP yang bergantung dari ketersediaan blangko KTP di Dirjen Dukcapil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya sarana pendukung dan inovasi pelayanan untuk memudahkan akses pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui penyelenggaraan sosialisasi, pelayanan jemput bola, dan pelayanan KK KTP di tingkat kecamatan.</li> </ul>

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Dalam penyusunan perencanaan program kegiatan, organisasi perangkat daerah perlu memperhatikan keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan di Kementerian atau Lembaga. Karena sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, tujuan, sasaran program, dan kegiatan termasuk kinerja

yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Isu strategis dalam bidang Administrasi Kependudukan yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 yaitu permasalahan dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan. Permasalahan-permasalahan yang diangkat antara lain:

- a) Pencapaian target nasional penerbitan akta kelahiran bagi anak belum merata persentasenya di tiap daerah;
- b) Tuntutan kebutuhan layanan pencatatan sipil secara meluas kepada seluruh warga negara termasuk luar negeri;
- c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan;
- d) Sarana dan prasarana sistem informasi administrasi kependudukan beberapa diantaranya telah memasuki masa *out of product, out of service, dan out of sale*.

Pemenuhan tantangan dalam bidang Administrasi Kependudukan tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan visi Kementerian Dalam Negeri, yaitu : ***“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat,***

***Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.***

Visi tersebut memiliki 4 (empat) kata kunci yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) **ADAPTIF**, dapat dimaknai bahwa Kemendagri ke depan mampu memosisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat.
- 2) **PROFESIONAL**, dapat dimaknai bahwa Kemendagri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur Pemerintahan Dalam Negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.\
- 3) **PROAKTIF**, dapat dimaknai bahwa Kemendagri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) **INOVATIF**, dapat dimaknai bahwa Kemendagri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut memiliki manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dari ketiga misi tersebut, misi yang mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan adalah misi ketiga, yaitu **Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah,**

**pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.**

Sejalan dengan visi dan misi di atas maka ditetapkanlah Tujuan Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Adapun tujuan strategis yang berkaitan dengan pengadaan pelayanan administrasi kependudukan adalah “**Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Penguatan Inovasi (T2)**”. Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran strategis **Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan (SS8)** dengan indikator sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

**Tabel .3.3.**  
**Renstra Kementerian Dalam Negeri yang Berkaitan dengan**  
**Pelayanan Administrasi Kependudukan**  
**Tahun 2020-2024**

<p>Visi : <i>“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.</i></p>				
<p>Misi : <i>“Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.”</i></p>				
<p>Tujuan Strategis : <b><u>“Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Penguatan Inovasi (T2)”</u></b></p>				
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2020	Target 2024	Unit Pelaksana
<b>1. Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan (SS8)</b>	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melapor	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	Ditjen Dukcapil
	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna	Ditjen Dukcapil

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada perlintasan jalan arteri primer Surabaya-Solo-Jakarta dan jalan kolektor primer Malang-Jombang-Babat. Selain itu, Kabupaten Jombang juga dilintasi ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang kini sedang dalam tahap konstruksi, sebagai bagian dari jalan tol Trans Jawa. Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Jombang termasuk dalam kawasan Wilayah Pengembangan Germakertosusila Plus, dan Perkotaan Jombang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yakni kawasan perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup lokal (skala kabupaten atau beberapa kecamatan) Kabupaten Jombang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041 sebagai upaya pemerataan perkembangan wilayah kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

Sebagai wilayah pengembang kegiatan agribisnis, Pemerintah Kabupaten Jombang membentuk kawasan strategis yang diwujudkan dalam Kawasan Agropolitan Kabupaten Jombang. Langkah lain yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mengamankan produksi pertanian yaitu dengan mulai menginventarisir lahan

pertanian tanaman pangan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). hal ini selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Abadi.

Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Jombang, kawasan lindung di Kabupaten Jombang meliputi kawasan hutan lindung (2.864,70 Ha), sempadan sungai (1.212 Ha), kawasan sekitar waduk (26,0 Ha), kawasan sekitar mata air (34,60 Ha), serta hutan kota (1.271,97 Ha).

Adapun kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi kawasan pertanian lahan basah (40.676 Ha), kawasan pertanian lahan kering (14.284,90 Ha), kawasan perkebunan (5.431,62 Ha), kawasan hutan produksi (20.580,80 Ha), kawasan permukiman (27.445,0 Ha), serta kawasan peruntukan industri (2.122,30 Ha).

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Jombang berkembang cukup pesat dimana pada beberapa lokasi telah

dimohonkan untuk kegiatan industri terutama di Wilayah Pengembangan Ploso. Kawasan peruntukan industri di Wilayah Pengembangan Ploso pada tahun 2029 direncanakan seluas 899,87 Ha. Di Wilayah Pengembangan Ploso telah berdiri industri dengan luasan 60 Ha di Desa Jatigedong Kecamatan Ploso yang dimiliki oleh PT. Plant Cheil Jedang Indonesia (CJI) Sedangkan potensi pengembangan lahan untuk kegiatan industri yang telah direncanakan oleh 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Java Fortis Corporindo dan PT. Kawasan Jombang luasnya mencapai 2.000 Ha. Kawasan yang telah dibebaskan untuk kegiatan industri pada Wilayah Pengembangan Ploso ini luasnya mencapai 800 Ha dimana masing-masing perusahaan mengajukan ijin seluas 400 Ha untuk tahap pertama.

#### **3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DSPENDUKCAPIL) Kabupaten Jombang bertanggung jawab terhadap 2,39% atau 5 indikator TPB Kabupaten Jombang yang berada pada Tujuan ke-1, 16 dan 17. Apabila dibandingkan dengan target Nasional, 3 indikator kewenangan DUKCAPIL masuk dalam kategori A (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target), dan 2 indikator masuk dalam kategori B (sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target). Berikut merupakan rincian indikator TPB Kabupaten Jombang yang menjadi kewenangan DUKCAPIL.

**Tabel 3.4.**  
**Capaian Indikator TPB Kewenangan DISPENDUKCAPIL**  
**Tahun 2018-2023**

No Indikator	Indikator	Kategori Ketercapaian	Isu Strategis
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	A	-
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	B	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	B	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	A	-
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	A	-

Indikator 16.9.1\*, 16.9.1.(a), belum mencapai target nasional karena nilai capaiannya lebih rendah dibandingkan target nasional. Apabila indikator tersebut mencapai target, maka dapat menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

#### **3.5.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan**

##### **Sipil Kabupaten Jombang**

Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya terus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga maupun individu memiliki dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan memiliki nilai strategis dalam berbagai intervensi pembangunan.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, penyelenggaraan administrasi kependudukan mengalami perubahan cukup mendasar. Pada saat ini telah dibangun dan masih terus dikembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan SIAK, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilaksanakan secara online dan terintegrasi dengan database kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri serta terintegrasi pula dengan informasi administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota lain.

Pandemi COVID-19 juga memberikan perubahan pelayanan yang mendasar, dimana pelayanan yang sebelumnya berbasis *offline* bergeser menjadi pelayanan *online* melalui NING YAONAH (Nikmatnya Ngantri dan Pelayanan Online Mudah). Adapun layanan yang dapat diakses secara online melalui NING YAONAH adalah:

1. Pelayanan KTP-el;
2. Pelayanan KIA;
3. Akta Kelahiran;
4. Akta Kematian;
5. Surat Keterangan Pindah (Pindah dari Jombang);
6. Surat Keterangan Datang (Datang ke Jombang);
7. Online NIK/KK; dan
8. SKTT bagi WNA.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara langsung berhubungan dengan tingkat kepuasan masyarakat. Permasalahan pokok yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan harus menjadi pijakan dalam pelaksanaan program antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan kepemilikan dokumen kependudukan;
2. Kurang memadainya dukungan kelengkapan sarana/prasarana dan sumber daya manusia;
3. Validasi data kependudukan yang belum optimal;
4. Implementasi kerjasama dan pemanfaatan data yang kurang optimal;

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka pelayanan administrasi kependudukan berfokus pada:

1. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan;
2. Peningkatan dan pematapan pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar integrasi SIAK dengan database kependudukan dapat terintegrasi secara optimal;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
4. Optimaliasasi kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan;
5. Optimalisasi validasi laporan data kependudukan;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pendukung pelayanan;

**Tabel 3.5.**  
**Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis**

NO	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	AKAR MASALAH	DATA/INFORMASI TERKAIT	ISU STRATEGIS
1	2	3	4	5
1.	Belum adanya fasilitas yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini pendekatan masih hanya sebatas sampai ke Kecamatan	Proses pelayanan yang harus dilalui masyarakat cukup panjang mulai dari tingkat RT, Desa, Kecamatan hingga Dispendukcapil	Jumlah Kecamatan : 21 Kecamatan; Jumlah Desa dan Kelurahan : 306	Pelayanan kurang dekat ke masyarakat
2	Data penerbitan akta kelahiran di daerah tidak sinkron dengan data di pusat karena masih ada data yang belum sinkron	NIK tidak sesuai dengan database	Jumlah anak usia 0 - 18 tahun 366.058 dan yang memiliki akta kelahiran 316.633/86,56 % , sedangkan target nasional tahun 2020 adalah sebesar 92%	Capaian target nasional akta kelahiran belum mencapai target yang telah ditentukan
3	Sinkronisasi data kependudukan untuk kepentingan	Banyaknya NIK yang tidak bergerak/mutasi	Tahun 2020 ada sebanyak 57.000 data ganda dan anomali yang	Tingginya data anomali dan ganda

	pemberian bantuan sosial, kartu tani, dan pelayanan publik lainnya		divalidasi	
--	--	--	------------	--

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

##### **4.1.1. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dapat mengetahui hal-hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang adalah:

- 1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**
- 2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi**

Adapun indikator dari tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

***Tujuan I : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.***

- a. Indeks Kualitas Pelayanan Publik;

***Tujuan II : Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi***

- a. Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan tersebut ditentukan dalam rangka melaksanakan dan mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten periode Tahun 2018-2023 pada misi pertama yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.**

#### **4.1.2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam rangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yang telah dirumuskan dalam RPJMD pada sasaran strategis daerah yaitu:

- 1. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan.**
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.**

Sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut maka ditetapkan indikator sasaran strategis sebagai berikut:

**Sasaran I: Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan**

1. Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Indeks Pelayanan Publik;

**Sasaran II: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang**

1. Nilai Evaluasi SAKIP.

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA				
				TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Prima Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat		Indikator Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	96.29	96.29	96.29	NA	NA
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	1. Prosentase Cakupan Penerbitan KK;	85%	87%	NA	NA	NA
			2. Prosentase Cakupan Penerbitan KTP el;	92%	93%	NA	NA	NA
			3. Penerbitan KIA;	8%	22%	NA	NA	NA
			4. Prosentase pelaporan data administrasi kependudukan oleh instansi lain;	70%	100%	NA	NA	NA
			5. Prosentase pemanfaatan data administrasi;	100%	75%	NA	NA	NA
			6. Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran;	76.82%	75%	NA	NA	NA
			7. Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan;	100%	100%	NA	NA	NA
			8. Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Perceraian;	100%	100%	NA	NA	NA
			9. Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian;	100%	100%	NA	NA	NA
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Indeks Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NA	NA	8.19	8.19	NA

		<b>Sasaran Strategis :</b> Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	NA	84,25	84,25	NA
			2. Indeks Pelayanan Publik	NA	NA	3,98	3,98	NA
			3. Nilai Evaluasi SAKIP	NA	NA	80,15	80,15	NA
		<b>Sasaran Program:</b> 1. Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Prosentase Cakupan Penerbitan KK;	NA	NA	89%	91%	NA
			2. Prosentase Cakupan Penerbitan KTP el;	NA	NA	94%	95%	NA
			3. Penerbitan KIA;	NA	NA	37%	38%	NA
		2. Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Sipil	1. Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	NA	NA	95%	95%	NA
		3. Meningkatkan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data oleh Instansi Lain	1. Persentase cakupan perjanjian kerjasama pemanfaatan data yang disusun	NA	NA	25%	31%	NA
			2. Persentase pelaporan data administrasi kependudukan	NA	NA	100%	100%	NA
			3. Persentase inovasi pelayanan yang diterapkan	NA	NA	100%	100%	NA
		4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	NA	NA	100%	100%	NA
<b>1</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Layanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>		<b>Indeks Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>8.19</b>
		<b>Sasaran Strategis :</b> Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	NA	NA	NA	84,25
			2. Indeks Pelayanan Publik	NA	NA	NA	NA	3,98
		<b>Sasaran Program:</b> 4. Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4. Prosentase Cakupan Penerbitan KK;	NA	NA	NA	NA	93%
			5. Prosentase Cakupan Penerbitan KTP el;	NA	NA	NA	NA	96%

			6. Penerbitan KIA;	NA	NA	NA	NA	39%
		5. Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	2. Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	NA	NA	NA	NA	95%
		6. Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data oleh Instansi Lain	5. Persentase cakupan perjanjian kerjasama pemanfaatan data yang disusun	NA	NA	NA	NA	35%
			6. Persentase pelaporan data administrasi kependudukan	NA	NA	NA	NA	100%
			7. Persentase inovasi pelayanan yang diterapkan	NA	NA	NA	NA	100%
	<b>Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	NA	NA	NA	NA	
		<b>Sasaran Strategis</b> Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja PD	1. Nilai Evaluasi SAKIP	NA	NA	NA	NA	80,15
		1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	NA	NA	NA	NA	100%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

##### **5.1.1. Strategi**

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, meliputi pembuatan kebijakan serta menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2018-2023. Adapun strategi yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan;
2. Peningkatan dan pemantapan pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar integrasi SIAK dengan database kependudukan dapat terintegrasi secara optimal;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

4. Optimalisasi kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan;
5. Optimalisasi validasi laporan data kependudukan;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pendukung pelayanan;

### **5.1.2. Kebijakan**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai 5 (lima) tahun kedepan adalah dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan. Adapun arah dari kebijakan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui pelayanan berbasis online untuk memudahkan masyarakat memperoleh akses layanan;
2. Optimalisasi penerapan inovasi pelayanan dan menambah inovasi-inovasi pelayanan untuk memudahkan masyarakat.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
4. Meningkatkan koordinasi kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan data kependudukan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang**

<b>VISI : BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING</b>			
<b>MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional</b>			
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
<b>Meningkatkan Kualitas Layanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui pelayanan berbasis online untuk memudahkan masyarakat memperoleh akses layanan;</li> <li>2. Optimalisasi penerapan inovasi pelayanan dan menambah inovasi-inovasi pelayanan untuk memudahkan masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan;</li> <li>4. Meningkatkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan;</li> <li>2. Peningkatan dan pemantapan pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar integrasi SIAK dengan database kependudukan dapat terintegrasi secara optimal;</li> <li>3. Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi pelayanan administrasi kependudukan;</li> <li>4. Optimaliasasi kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan;</li> <li>5. Optimalisasi validasi</li> </ol>

		<p>koordinasi kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan data kependudukan;</p> <p>5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.</p>	<p>laporan data kependudukan;</p> <p>6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pendukung pelayanan;</p>
--	--	---	--

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Berikut merupakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk periode tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

#### **A. 2018-2020**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  - a. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
  - a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor;
  - b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala/ Sedang/ Berat Gedung Kantor/ Bangunan Pendukungnya;

- c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala/ Sedang/ Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor;
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat kendaraan dinas/ kendaraan operasional;
3. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD;
- a. Penyusunan rencana strategis SKPD;
  - b. Penyusunan rencana kerja SKPD;
  - c. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD;
  - d. Penyusunan laporan Keuangan SKPD.
4. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
  - b. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Pindah Datang;
  - c. Kegiatan Pelayanan Pendataan Penduduk;
5. Program Pengelolaan Informasi, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - b. Kegiatan pemanfaatan Data Oleh Instansi dan Masyarakat;
  - c. Kegiatan Penerbitan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
6. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - b. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan);

- c. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 7. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
  - a. Kegiatan Penerbitan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data;
  - b. Kegiatan Inovasi Pelayanan;
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Data Oleh Instansi dan Masyarakat;
- 8. Program Pelayanan Pencatatan Sipil;
  - a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
  - b. Kegiatan Peningkatan Data Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan;
  - c. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perubahan Akta-Akta Pencatatan Sipil.

## **B. 2021-2023 PERUBAHAN PERTAMA**

- 1. Program Pendaftaran Penduduk;
  - a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
    - i. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan;
    - ii. Sub Kegiatan Pencatatan, Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan;
    - iii. Pendataan Penduduk Non Permanen Dan Rentan Administrasi;

2. Program Pencatatan Sipil;
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
    - i. Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil;
  - b. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil;
    - i. Sub Kegiatan Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil;
    - ii. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting;
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan;
    - i. Sub Kegiatan Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan;
    - ii. Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan;
  - b. Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
    - i. Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

- c. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - i. Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - ii. Sub Kegiatan Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
- 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
  - a. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan;
    - i. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain;
- 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah;
    - i. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - ii. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    - i. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    - ii. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
    - iii. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - i. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - ii. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor;
  - iii. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - iv. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - v. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan;
  - vi. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - vii. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - i. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik;
  - iii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - i. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Jabatan;
  - ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan;
  - iii. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilisasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya;
  - iv. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

## **C. 2021-2023 PERUBAHAN KEDUA**

- 1. Program Pendaftaran Penduduk;
  - 1.1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
    - 1.1.1. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan;
    - 1.1.2. Sub Kegiatan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan;
    - 1.1.3. Pendataan Penduduk Non Permanen Dan Rentan Administrasi;

2. Program Pencatatan Sipil;
  - 2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
    - 2.1.1. Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil;
  - 2.2. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil;
    - 2.2.1. Sub Kegiatan Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil;
    - 2.2.2. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting;
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - 3.1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan;
    - 3.1.1. Sub Kegiatan Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan;
    - 3.1.2. Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan;
  - 3.2. Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
    - 3.2.1. Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi AdDministrasi Kependudukan;

- 3.2.2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
- 3.3. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - 3.3.1. Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - 3.3.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
- 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
  - 4.1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan;
    - 4.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain;
- 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 5.1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah;
    - 5.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - 5.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - 5.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    - 5.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- 5.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- 5.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
- 5.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - 5.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - 5.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor;
  - 5.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - 5.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - 5.3.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan;
  - 5.3.6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 5.3.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
- 5.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 5.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

- 5.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 5.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - 5.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik;
  - 5.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 5.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Jabatan;
  - 5.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan;
  - 5.6.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya;
  - 5.6.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang**

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program	Indikator	Data Capaian Awal (2018)	REALISASI TARGET				TARGET KINERJA						Kondisi Kinerja Akhir Periode Th 2023		Catatan			
							2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
4	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26			
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Prima sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Prosentase Cakupan Penerbitan KK;		Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pengajuan KK untuk diterbitkan	100%	100%		91.54%		NA		NA		NA		NA		NA			
		Prosentase Cakupan Penerbitan KTP;			Persentase pengajuan KTP el untuk diterbitkan	100%	100%		100.00%		0%		NA		NA		NA		NA			
		Prosentase Cakupan Penerbitan KIA;			Persentase pengajuan KIA untuk diterbitkan	NA	100%		100.00%		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
		Prosentase pemanfaatan data administrasi kependudukan oleh instansi lain;			Persentase pengajuan SKTT bagi WNA yang memiliki KITAS untuk diterbitkan	NA	100%	131,325,274	100.00%		80,620,591		NA	NA	NA	NA		NA		NA	NZA	
		Prosentase pelaporan data administrasi kependudukan oleh instansi lain;			Persentase pengajuan surat datang WNI untuk diterbitkan	NA	100%		100.00%				NA		NA		NA		NA		NA	

		Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran;		Persentase pengajuan surat pindah WNI untuk diterbitkan	NA	100%		100.00%		NA		NA		NA		NA		
		Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan;		Persentase pengajuan surat keterangan datang luar negeri untuk diterbitkan	NA	100%		100.00%		NA		NA		NA		NA		
		Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Perceraian;		Jumlah perekaman terhadap wajib KTP el	NA	18920 orang		17698		4%		NA		NA		NA		
		Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian;		Persentase pengajuan SKPTI dan SKOT bagi penduduk rentan untuk diterbitkan	NA	100%		100.00%		NA		NA		NA		NA		
		Nilai Evaluasi SAKIP	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pengajuan KK	107.581 lembar	81087		78,059		NA		NA		NA		NA		
				Jumlah pelayanan pengajuan KTP el	134.117 keping	100356	87,180,274	109,573	50,712,791	NA								
				Jumlah Pelayanan Pengajuan KIA	NA	69864		43,472		NA		NA		NA		NA		
				Jumlah pelayanan pengajuan SKTT	NA	42		21		NA		NA		NA		NA		
			Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Pindah Datang Penduduk	Jumlah pengajuan pelayanan Surat Datang WNI	14.524 dokumen	7364		6,111		NA		NA		NA		NA		
				Jumlah pengajuan pelayanan Surat Keluar WNI	NA	7315	9,850,000	5,834	6,403,200	NA								
				Jumlah pengajuan pelayanan Surat Keterangan Datang Luar Negeri	NA	83		65		NA		NA		NA		NA		
			Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pengajuan pelayanan SKPTI dan SKOT	115 dokumen	76	34,295,000	70 berkas	23,504,600	NA								
			Program Pengelolaan Informasi, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Persentase validasi pelaporan data administrasi kependudukan	NA	100%		NA		NA		NA		NA		NA		
				Persentase validasi data kependudukan yang anomali dan ganda	NA	100%	101,406,310	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
				Persentase pengelolaan jaringan SIAK secara online	NA	100%		NA		NA		NA		NA		NA		

				Persentase Pemanfaatan Data oleh instansi lain	NA	100%		NA		NA		NA		NA		NA				
				Persentase kerjasama pemanfaatan data yang disahkan dengan instansi lain	NA	100%	101,406,310	NA		NA		NA		NA		NA				
			Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyusunan laporan data administrasi kependudukan	32 lembar	24	101,406,310	NA		NA		NA		NA		NA				
		Jumlah validasi data kependudukan dari data ganda dan anomali		NA	63006	NA			NA		NA		NA		NA		NA			
		Jumlah Pengelolaan SIAK secara online		252 kali	252	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi administrasi kependudukan		NA	450	NA			NA		NA		NA		NA		NA			
		Jumlah leaflet yang terdistribusi		2000 lembar	5200	NA			NA		NA		NA		NA		NA			
			Kegiatan Pemanfaatan Data oleh Instansi dan Masyarakat	Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan	5 instansi	1	21,732,300	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
			Kegiatan Pemberian Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Jumlah rancangan perjanjian kerjasama yang disusun	5 pks	3	44,899,608	NA	NA	NA		NA		NA		NA				
		Jumlah pengajuan usulan inovasi pelayanan		5 dokumen	6	NA		NA	NA		NA		NA		NA		NA			
			Program Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	Persentase validasi pelaporan data administrasi kependudukan	NA	NA	NA	100%	13,203,700	NA		NA		NA		NA				
		Persentase validasi data kependudukan yang anomali dan ganda		NA	NA	100%		NA			NA									
		Persentase pengelolaan jaringan SIAK secara online		NA	NA	100%		NA			NA									
			Kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah penyusunan laporan data administrasi kependudukan	NA	NA	NA	24 laporan	7,150,000	NA		NA		NA		NA				
		Jumlah validasi data kependudukan dari data ganda dan anomali		NA	NA	57000 data		NA			NA									
			Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun,Updating	Jumlah Pengelolaan jaringan SIAK secara online	NA	NA	NA	252 kali	-	NA										

				dan pemeliharaan)	Jumlah peserta Bimtek untuk Operator SIAK	NA	NA		102 orang		NA		NA		NA		NA								
				Kegiatan penyebarluasan informasi administrasi kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi administrasi kependudukan	NA	NA	NA	1209 orang	6,053,700	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
					Jumlah leaflet yang terdistribusi	NA	NA		-		NA		NA												
				Program Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan	Persentase kerjasama data yang disahkan dengan instansi lain	NA	NA	NA	100%	18,051,710	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
					Persentase pemanfaatan data oleh instansi lain	NA	NA		100%		NA		NA												
					persentase inovasi pelayanan yang diterapkan	NA	NA		100%		NA		NA												
				Kegiatan penerbitan perjanjian kerjasama pemanfaatan data	Jumlah rencana perjanjian kerjasama yang disusun	NA	NA	NA	4 dokumen	11,101,710	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
				kegiatan inovasi pelayanan	Jumlah pengajuan usulan inovasi pelayanan	NA	NA		4 inovasi		4,575,000		NA						NA						
				Kegiatan pemanfaatan data oleh instansi dan masyarakat	jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan	NA	NA		4 instansi		2,375,000		NA						NA						
				Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pencatatan Kelahiran;	100%	100%	121,616,269	100%	42,397,350	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
					Persentase Pencatatan Perceraian	100%	100%		100%		NA		NA												
					Persentase Pencatatan Perkawinan;	100%	100%		100%		NA		NA												
					Persentase Pencatatan Kematian;	100%	100%		100%		NA		NA												
				Kegiatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	Jumlah pelayanan pengajuan akta kelahiran	34323 berkas	31675	104,876,676	20,697	22,661,150	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
				Kegiatan Peningkatan Data Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	Jumlah pelayanan pengajuan akta perkawinan	117 berkas	114	7,752,760	96	10,270,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
					Jumlah pelayanan pengajuan akta perceraian	28 berkas	26		22		NA		NA												

			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perubahan Akta-Akta Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pengajuan akta kematian	599 dokumen	617		912		NA		NA		NA		NA		
				Jumlah pelayanan pengajuan perubahan kutipan II akta	2000 berkas	2197	8,986,833	1,933	9,466,200	NA								
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3,673,446,736	100%	1,754,004,117	NA								
			Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	29 kebutuhan	29	3,673,446,736	29	1,754,004,117	NA								
				Jumlah pemenuhan kebutuhan ajsa administrasi teknis perkantoran	36 orang	36		36		NA		NA		NA		NA		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	100%	100%	1,448,894,727	100%	678,510,250	NA								
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	54 unit	45	1,288,200,256	45	456,697,600	NA								
			Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	4 kali	4	36,503,100	4	124,204,000	NA								
			Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	144 unit	223	90,607,271	223	78,300,000	NA								
			Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	6 unit	6	33,584,100	6	22,445,425	NA								
			Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan	22 dokumen	22	31,696,000	22	29,597,000	NA								
			Penyusunan rencana strategis SKPD	Jumlah dokumen rencana strategis SKPD tersusun	1 dokumen	1	-	1	-	NA								
			Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja SKPD tersusun	2 dokumen	2	19,556,000	2	19,882,000	NA								

				Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD tersusun	35 dokumen	35	11,460,000	35	4,955,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
				Penyusunan laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD tersusun	18 dokumen	18	680,000	18	4,760,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
				Program Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	Persentase Penunjang Pelayanan Administrasi	100%	100%	3,065,980,672	100%	3,796,276,648	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
				Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kebutuhan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terpenuhi	11 kebutuhan					NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat SIAK	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK dan perangkat pendukungnya	1 sistem					NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat					NA		NA		84.25		93.29		NA		NA			
		Indeks Pelayanan Publik					NA		NA		3.98		4.125		NA		NA			
Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja PD	Nilai Evaluasi SAKIP					NA		NA		80.15		81		NA		NA			
				Program Pendaftaran Penduduk	Prosentase Cakupan Penerbitan KK;		NA		NA		89%		91%		NA		NA			
					Prosentase Cakupan Penerbitan KTP el;		NA	NA	NA		94%	539,681,200	95%	392,029,000	NA	NA	NA	NA		
					Prosentase Cakupan Penerbitan KIA;		NA		NA		37%		38.0%		NA		NA	NA		
				Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pengajuan KK untuk diterbitkan		NA	NA	NA	NA	90%	539,681,200	92%	392,029,000	NA	NA	NA	NA		

					Persentase pengajuan KTP el untuk diterbitkan		NA	NA	NA	NA	100%		100%		NA		NA		
					Persentase pengajuan KIA untuk diterbitkan		NA	NA	NA	NA	100%		100%		NA		NA		
					Persentase pengajuan SKTT bagi WNA yang memiliki KITAS untuk diterbitkan		NA	NA	NA	NA	100%		100%		NA		NA		
					Persentase pengajuan surat datang WNI untuk diterbitkan		NA	NA	NA	NA	100%		100%		NA		NA		
					Persentase pengajuan surat pindah WNI untuk diterbitkan		NA	NA	NA	NA	100%		100%		NA		NA		
					Persentase pengajuan surat keterangan datang luar negeri untuk diterbitkan		NA	NA	NA	NA	100%		100%		NA		NA		
					Persentase pengajuan SKPTI dan SKOT bagi penduduk rentan untuk diterbitkan		NA	NA	NA	NA	100%		100%		NA		NA		
				Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah pelayanan pengajuan KK		NA	NA	NA	NA	82000	519,281,200	82000	306,779,000	NA	NA	NA	NA	
					Jumlah pelayanan pengajuan KTP el		NA	NA	NA	NA	75000		75000		75000		NA		NA
					Jumlah Pelayanan Pengajuan KIA		NA	NA	NA	NA	25000		25000		25000		NA		NA
					Jumlah pelayanan pengajuan SKTT		NA	NA	NA	NA	15		15		15		NA		NA
				Sub Kegiatan Pencatatan, Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah pengajuan pelayanan Surat Datang WNI		NA	NA	NA	NA	10500	9,900,000	10500	22,000,000	NA	NA	NA	NA	
					Jumlah pengajuan pelayanan Surat Keluar WNI		NA	NA	NA	NA	7700		7700		7700		NA		NA
					Jumlah pengajuan pelayanan Surat Keterangan Datang Luar Negeri		NA	NA	NA	NA	120		120		120		NA		NA
				Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Jumlah pengajuan pelayanan SKPTI dan SKOT		NA	NA	NA	NA	100	10,500,000	100	63,250,000	NA	NA	NA	NA	

				Jumlah Perekaman Terhadap Wajib KTP el		NA	NA	NA	NA	12000		12000		NA		NA				
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data yang disusun		NA	NA	NA	NA	25%	37,445,000	31%	38,881,000	NA	NA	NA	NA		
					Prosentase pelaporan data administrasi kependudukan		NA	NA	NA	NA	100%	115,778,900	100%	132,007,900	NA	NA	NA	NA		
				Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Jumlah pelaporan data administrasi kependudukan yang dikirim		NA	NA	NA	NA	24 laporan	45,970,000	24 laporan	50,967,000	NA	NA	NA	NA		
					Jumlah validasi kependudukan yang anomali dan ganda		NA	NA	NA	NA	30000 data		30000 data		NA		NA	NA	NA	
					Jumlah perjanjian kerjasama yang disahkan		NA	NA	NA	NA	4 PKS	18,752,500	4 PKS	19,476,000	NA	NA	NA	NA		
				Sub Kegiatan Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah penyusunan laporan data administrasi kependudukan		NA	NA	NA	NA	24 laporan	45,970,000	24 laporan	50,967,000	NA	NA	NA	NA		
					Jumlah identifikasi data kependudukan dari data ganda dan anomali		NA	NA	NA	NA	30000 data		30000 data		NA		NA	NA	NA	
				Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	Jumlah rancangan perjanjian kerjasama yang disusun		NA	NA	NA	NA	4 dokumen	18,752,500	4 dokumen	19,476,000	NA	NA	NA	NA		
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah pembaharuan aplikasi SIAK dan aplikasi pendukung lain		NA	NA	NA	NA	2 aplikasi	22,243,900	2 aplikasi	24,683,900	NA	NA	NA	NA		
					Jumlah pengelolaan jaringan SIAK di kecamatan		NA	NA	NA	NA	21 kecamatan		21 kecamatan		NA		NA	NA	NA	
					Jumlah Bimbingan Teknis Operator		NA	NA	NA	NA	2 kali		2 kali		NA		NA	NA	NA	
				Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi	Jumlah maintenance jaringan SIAK di kecamatan dan dinas		NA	NA	NA	NA	21 Kecamatan	22,243,900	21 Kecamatan	24,683,900	NA	NA	NA	NA		

				kependudukan	Jumlah maintenance aplikasi SJAK dan aplikasi pendukung lain		NA	NA	NA	NA	2 aplikasi		2 aplikasi		NA		NA	
					Jumlah peserta Bimtek Operator		NA	NA	NA	NA	100 orang		100 orang		NA		NA	
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah instansi yang telah memanfaatkan data kependudukan		NA	NA	NA	NA	4 instansi	18,692,500	4 instansi	19,405,000	NA	NA	NA	NA
					Jumlah sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan		NA	NA	NA	NA	21 kecamatan	47,565,000	21 kecamatan	56,357,000	NA	NA	NA	NA
				Sub Kegiatan Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi administrasi kependudukan		NA	NA	NA	NA	340 orang	47,565,000	340 orang	56,357,000	NA	NA	NA	NA
					Jumlah leaflet yang terdistribusikan		NA	NA	NA	NA	1750 orang		1750 orang		NA		NA	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	jumlah pengajuan pemanfaatan data kependudukan oleh instansi		NA	NA	NA	NA	4 instansi	18,692,500	4 instansi	19,405,000	NA	NA	NA	NA
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Inovasi pelayanan yang diterapkan		NA	NA	NA	NA	100.00%	17,395,000	100%	21,381,000	NA	NA	NA	NA
				Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Inovasi pelayanan yang diterapkan		NA	NA	NA	NA	3 inovasi	17,395,000	3 inovasi	21,381,000	NA	NA	NA	NA
				Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah pengajuan usulan inovasi pelayanan		NA	NA	NA	NA	3 usulan	17,395,000	3 usulan	21,381,000	NA	NA	NA	NA
				Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran;		NA	NA	NA	NA	95%	77,610,500	95%	123,804,500	NA	NA	NA	NA
				Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pencatatan Kelahiran		NA	NA	NA	NA	100%	55,641,500	100%	59,035,500	NA	NA	NA	NA

				Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pengajuan akta kelahiran						20100 berkas	55,641,500	20100 berkas	59,035,500	NA	NA	NA	NA						
				Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pencatatan Perceraian					NA	NA	NA	NA	100%		100%		NA		NA				
					Persentase Pencatatan Perkawinan;					NA	NA	NA	NA	100%	21,969,000	100%	64,769,000	NA	NA	NA	NA			
					Persentase Pencatatan Kematian					NA	NA	NA	NA	100%		100%		NA		NA				
				Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pengajuan akta perkawinan					NA	NA	NA	NA	100 berkas	10,975,000	100 berkas	31,787,000	NA	NA	NA	NA			
					Jumlah pelayanan pengajuan akta perceraian					NA	NA	NA	NA	20 berkas			20 berkas			NA		NA		
				Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah pelayanan pengajuan akta kematian					NA	NA	NA	NA	1000 berkas	10,994,000	1000 berkas	32,982,000	NA	NA	NA	NA			
					Jumlah pelayanan pengajuan perubahan kutipan II akta					NA	NA	NA	NA	2000 berkas				2000 berkas			NA		NA	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur					NA	NA	NA	NA	100%	7,391,481,080	100%	12,479,225,080	NA	NA	NA	NA			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan						NA	NA	NA	NA	100%	40,500,000	100%	161,877,000	NA	NA	NA	NA		
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun						NA	NA	NA	NA	71 Dokumen	36,125,000	71 Dokumen	136,527,000	NA	NA	NA	NA
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun						NA	NA	NA	NA	31 laporan	4,375,000	31 laporan	25,350,000	NA	NA



					Jumlah data pegawai yang diupdate pada sistem informasi aplikasi pelayanan Aparatur Sipil Negara (SIAP ASN)			NA	NA	NA	NA	50 dokumen		50 dokumen		NA		NA		
				Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			NA	NA	NA	NA	100%	895,645,000	100%	1,446,575,000	NA	NA	NA	NA	
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi			NA	NA	NA	NA	13 jenis	12,760,000	13 jenis	12,760,000	NA	NA	NA	NA	
				Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi			NA	NA	NA	NA	61 jenis	142,580,000	61 jenis	295,580,000	NA	NA	NA	NA	
				Sub Kegiatan Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang tersusun			NA	NA	NA	NA	4 jenis	1,526,000	4 jenis	1,526,000	NA	NA	NA	NA	
				Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi			NA	NA	NA	NA	68 orang	231,820,000	67 orang	257,230,000	NA	NA	NA	NA	
				Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak			NA	NA	NA	NA	65845 keping	354,790,000	65845 keping	727,310,000	NA	NA	NA	NA	
					Jumlah pemenuhan barang penggandaan							24792 lembar		24792 lembar		NA		NA		
				Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan			NA	NA	NA	NA	12 jenis	4,070,000	12 buku	4,070,000	NA	NA	NA	NA	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			NA	NA	NA	NA	624 kali	148,099,000	624 kali	148,099,000	NA	NA	NA	NA	
				Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur			NA	NA	NA	NA	100%	100,000,000	100%	4,220,617,000	NA	NA	NA	NA	
				Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor			NA	NA	NA	NA	3 unit	100,000,000	142 unit	4,220,617,000	NA	NA	NA	NA	

				Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah		NA	NA	NA	NA	100%	1,089,985,000	100%	1,089,985,000	NA	NA	NA	NA	
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat		NA	NA	NA	NA	3 jenis	43,360,000	3 jenis	43,360,000	NA	NA	NA	NA	
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi		NA	NA	NA	NA	12 bulan	186,000,000	12 bulan	186,000,000	NA	NA	NA	NA	
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum		NA	NA	NA	NA	2 jenis	860,625,000	2 jenis	860,625,000	NA	NA	NA	NA	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang milik Daerah dalam kondisi baik		NA	NA	NA	NA	100%	317,071,000	100%	348,661,000	NA	NA	NA	NA	
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara		NA	NA	NA	NA	1 unit	46,010,000	1 unit	20,600,000	NA	NA	NA	NA	
					Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajaknya		NA	NA	NA	NA	1 unit		1 unit		NA	NA	NA	NA	
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara		NA	NA	NA	NA	5 unit	67,978,000	5 unit	94,978,000	NA	NA	NA	NA	
					Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya		NA	NA	NA	NA	5 unit		5 unit		NA	NA	NA	NA	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara		NA	NA	NA	NA	145 unit	203,083,000	145 unit	233,083,000	NA	NA	NA	NA	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara		NA	NA	NA	NA	N/A	N/A	1 gedung	125,000,000	NA	NA	NA	NA	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	N/A	NA	NA	NA	NA	100%	2,709,877,000	100%	2,709,877,000	NA	NA	NA	NA	DAK

				Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		NA	NA	NA	NA	100%	2,105,006,000	100%	2,105,006,000	NA	NA	NA	NA	DAK
				Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pemenuhan administrasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil		NA	NA	NA	NA	45 jenis	1,746,134,000	45 jenis	1,746,134,000	NA	NA	NA	NA	DAK
				Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka penerapan Dukcapil Go Digital		NA	NA	NA	NA	8 kali	19,000,000	8 kali	19,000,000	NA	NA	NA	NA	DAK
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		NA	NA	NA	NA	400 dokumen	339,872,000	400 dokumen	339,872,000	NA	NA	NA	NA	DAK
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan tim terkait pencapaian target nasional		NA	NA	NA	NA	100%	419,400,000	100%	419,400,000	NA	NA	NA	NA	DAK
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan tim terkait pencapaian target nasional		NA	NA	NA	NA	12 bulan	419,400,000	12 bulan	419,400,000	NA	NA	NA	NA	DAK
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelaksanaan sosialisasi administrasi kependudukan		NA	NA	NA	NA	100%	160,471,000	100%	160,471,000	NA	NA	NA	NA	DAK
				Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi administrasi kependudukan		NA	NA	NA	NA	75 orang	160,471,000	75 orang	160,471,000	NA	NA	NA	NA	DAK
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pelaksanaan peningkatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		NA	NA	NA	NA	1	25,000,000	1	25,000,000	NA	NA	NA	NA	DAK
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket /surat dikirimkan		NA	NA	NA	NA	25 kali	25,000,000	25 kali	25,000,000	NA	NA	NA	NA	DAK
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat					NA		NA		NA		NA		93.29		84.25		

		Indeks Pelayanan Publik				NA		NA		NA		NA		4.125		3.98		
Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja PD	Nilai Evaluasi SAKIP				NA		NA		NA		NA		81		80.15		
				Program Pendaftaran Penduduk	Prosentase Cakupan Penerbitan KK;	NA		NA		NA		NA		93%		93%		
					Prosentase Cakupan Penerbitan KTP el;	NA	96%	97,100,000	96%	97,100,000								
					Prosentase Cakupan Penerbitan KIA;	NA		NA		NA		NA		39.0%		39.0%		
				Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pengajuan KK untuk diterbitkan	NA	95%		95%									
					Persentase pengajuan KTP el untuk diterbitkan	NA	100%		100%									
					Persentase pengajuan KIA untuk diterbitkan	NA	100%		100%									
					Persentase pengajuan SKTT bagi WNA yang memiliki KITAS untuk diterbitkan	NA	100%		100%									
					Persentase pengajuan surat datang WNI untuk diterbitkan	NA	100%		100%									
					Persentase pengajuan surat pindah WNI untuk diterbitkan	NA	100%	97,100,000	100%	97,100,000								
					Persentase pengajuan surat keterangan datang luar negeri untuk diterbitkan	NA	100%		100%									
					Persentase pengajuan SKPTI dan SKOT bagi penduduk rentan untuk diterbitkan	NA	100%		100%									
				Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	NA	182015	97,100,000	182015	97,100,000								

				Sub Kegiatan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan		NA	18320	-	18320	-							
				Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		NA	100	-	100	-							
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data yang disusun		NA	35%	10,947,500	35%	5,255,500							
					Prosentase pelaporan data administrasi kependudukan		NA	100%	65,714,400	100%	11,031,000							
				Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	jumlah pelaporan data administrasi kependudukan yang dikirim		NA	NA	NA	NA	NA	NA	24 laporan	11,031,000	30000 data	24 laporan	11,031,000	
					jumlah validasi kependudukan yang anomali dan ganda		NA	NA	NA	NA	NA	NA	30000 data			30000 data		
					Jumlah perjanjian kerjasama yang disahkan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	4PKS	5,255,500	4PKS	5,255,500		
				Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	11,031,000.00	4	11,031,000.00		
				Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	5,255,500.00	4	5,255,500.00		
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah pembaharuan aplikasi SIAK dan aplikasi pendukung lain		NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	29,421,400	21	2	29,421,400	
					Jumlah pengelolaan jaringan SIAK di kecamatan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	21			21		
					Jumlah Bimbingan Teknis Operator		NA	NA	NA	NA	NA	NA	2			2		
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	21	25,200,000.00	21	25,200,000.00		

				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	4,221,400.00	2	4,221,400.00	
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah instansi yang telah memanfaatkan data kependudukan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	5,692,000	4	5,692,000	
					Jumlah sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	21	25,262,000	21	25,262,000	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	5,692,000	4	5,692,000	
				Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	25,262,000	4	25,262,000	
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Inovasi pelayanan yang diterapkan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	29,883,500	100%	29,883,500	
				Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Inovasi pelayanan yang diterapkan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	29,883,500	3	29,883,500	
				Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	29,883,500	2	29,883,500	
				Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran;		NA	NA	NA	NA	NA	NA	95%	79,940,600	95%	79,940,600	
				Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pencatatan Kelahiran		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	76,128,500	100%	76,128,500	
				Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		NA	NA	NA	NA	NA	NA	20100	76,128,500	20100	76,128,500	
				Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pencatatan Perceraian		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	3,812,100	100%	3,812,100	
					Persentase Pencatatan Perkawinan;		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%		100%		

				Persentase Pencatatan Kematian		NA		NA		NA		NA		100%		100%		
				Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	NA	120	2,582,000	120	2,582,000								
				Sub Kegiatan Pencatatan, penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	NA	3000	1,230,100	3000	1,230,100								
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	NA	100%		100%									
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	NA	100%	17,777,550	100%	17,777,550								
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	71	2,249,750	71	2,249,750								
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	NA	31	15,527,800	31	15,527,800								
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	NA		NA		NA		NA		100%	5,320,530,597	100%	5,320,530,597	
					Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	NA	100%		100%									
					Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	NA		NA		NA		NA		100%		100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	NA	28	5,191,760,797	28	5,191,760,797								
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	NA	300	127,770,000	300	127,770,000								

				Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			NA	18	999,800	18	999,800									
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian			NA	100%	-	100%	-									
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			NA	68	-	68	-									
				Sub Kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian				NA	150	-	150	-									
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			NA	100%	1,733,014,150	100%	1,733,014,150									
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			NA	13	12,750,600	13	12,750,600									
				Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan			NA	61	1,169,691,500	61	1,169,691,500									
				Sub Kegiatan Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			NA	4	-	4	-									
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			NA	67	120,482,100	67	120,482,100									
				Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			NA	8	337,904,050	8	337,904,050									
				Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			NA	12	4,704,000	12	4,704,000									
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			NA	624	87,481,900	624	87,481,900									
				Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur			NA	100%	-	100%	-									

				Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		NA	0	-	0	-	0						
				Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah		NA	100%	905,350,000	100%	905,350,000							
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		NA	12	57,150,000	12	57,150,000							
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		NA	12	175,000,000	12	175,000,000							
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan		NA	12	673,200,000	12	673,200,000							
				Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Umum Kantor yang Disediakan		NA	100%	332,865,300	100%	332,865,300							
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		NA	1	42,110,000	1	42,110,000							
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		NA	5	85,800,000	5	85,800,000							
				Sub Kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		NA	145	204,955,300	145	204,955,300							
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		NA	1		1								

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan OPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan. Pada bagian ini diuraikan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran dan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 dimaksud, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 7.1.**  
**Indikator Kinerja Dispendukcapil Kabupaten Jombang**  
**Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Kinerja				Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
1	2	3	4	5		7	8	9	
<b>RENSTRA 2018-2023</b>									
	Indikator Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan		94.81	84.25	NA	NA	NA	NA	
	Prosentase Cakupan Penerbitan KK;	98.98%	86.62%	93.72%	NA	NA	NA	NA	
	Prosentase Cakupan Penerbitan KTP;	88.60%	97.14%	98.01%	NA	NA	NA	NA	
	Prosentase Cakupan Penerbitan KIA;	NA	21.68%	41.58%	NA	NA	NA	NA	
	Persentase pengajuan KK untuk diterbitkan	88.60%	90.96%	91.54%	NA	NA	NA	NA	
	Persentase pengajuan KTP el untuk diterbitkan	100%	100.00%	100.00%	NA	NA	NA	NA	
	Persentase pengajuan KIA untuk diterbitkan	NA	100.00%	100.00%	NA	NA	NA	NA	
	Persentase pengajuan SKTT bagi WNA yang memiliki KITAS untuk diterbitkan	NA	100.00%	100.00%	NA	NA	NA	NA	
	Persentase pengajuan surat datang WNI untuk diterbitkan	NA	100%	100%	NA	NA	NA	NA	
	Persentase pengajuan surat pindah WNI untuk diterbitkan	NA	100%	100%	NA	NA	NA	NA	
	Persentase pengajuan surat keterangan datang	NA	100%	100%	NA	NA	NA	NA	

	luar negeri untuk diterbitkan							
	Jumlah perekaman terhadap wajib KTP el	NA	18920	17698	NA	NA	NA	NA
	Persentase pengajuan SKPTI dan SKOT bagi penduduk rentan untuk diterbitkan	NA	100.00%	100.00%	NA	NA	NA	NA
	<b>Prosentase pemanfaatan data administrasi kependudukan oleh instansi lain;</b>	<b>NA</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
	Persentase kerjasama data yang disahkan dengan instansi lain	NA	100%	100%	NA	NA	NA	NA
	Persentase pemanfaatan data oleh instansi lain	NA	100%	100%	NA	NA	NA	NA
	persentase inovasi pelayanan yang diterapkan	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA
	<b>Prosentase pelaporan data administrasi kependudukan oleh instansi lain;</b>	<b>NA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
	Persentase validasi pelaporan data administrasi kependudukan	NA	100%	100%	NA	NA	NA	NA
	Persentase validasi data kependudukan yang anomali dan ganda	NA	100%	100%	NA	NA	NA	NA
	Persentase pengelolaan jaringan SIAK secara online	NA	100%	100%	NA	NA	NA	NA
	<b>Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran;</b>	<b>76.82%</b>	<b>79.52%</b>	<b>86.54%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
	<b>Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan;</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
	<b>Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Perceraian;</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
	<b>Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian;</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

	Persentase Pencatatan Kelahiran;	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA
	Persentase Pencatatan Perceraian	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA
	Persentase Pencatatan Perkawinan;	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA
	Persentase Pencatatan Kematian;	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA
	<b>Nilai Evaluasi SAKIP</b>		<b>74.8</b>	<b>80.12</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
	Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA
	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA
	Jumlah dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA
	Persentase Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA
<b>PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 (I)</b>								
	<b>Indeks Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>8.79</b>	<b>8.19</b>	<b>8.19</b>	<b>NA</b>
	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>93.29</b>	<b>84.25</b>	<b>84.25</b>	<b>NA</b>
	<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>4.128</b>	<b>3.98</b>	<b>3.98</b>	<b>NA</b>
	<b>Nilai Evaluasi SAKIP</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>80.44</b>	<b>80.15</b>	<b>80.15</b>	<b>NA</b>
	Prosentase Cakupan Penerbitan KK;	NA	NA	NA	122.60%	91%	93%	NA

	Prosentase Cakupan Penerbitan KTP el;	NA	NA	NA	97.88%	95%	96%	NA
	Prosentase Cakupan Penerbitan KIA;	NA	NA	NA	50.67%	38%	39%	NA
	Prosentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data yang disusun	NA	NA	NA	26.83%	31%	35%	NA
	Prosentase pelaporan data administrasi kependudukan	NA	NA	NA	100%	100%	100%	NA
	Persentase Inovasi pelayanan yang diterapkan	NA	NA	NA	100%	100%	100%	NA
	Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran;	NA	NA	NA	90.34%	95%	95%	NA
	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	NA	NA	NA	122.38%	100%	100%	NA
	Presentase Pemenuhan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA

#### PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023 (II)

	<b>Indeks Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>8.19</b>
	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>84.25</b>
	<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>3.98</b>
	Prosentase Cakupan Penerbitan KK;	NA	NA	NA	NA	NA	NA	93%
	Prosentase Cakupan Penerbitan KTP el;	NA	NA	NA	NA	NA	NA	96%
	Prosentase Cakupan Penerbitan KIA;	NA	NA	NA	NA	NA	NA	39%
	Prosentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data yang disusun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	35%
	Prosentase pelaporan data	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%

	administrasi kependudukan							
	Persentase Inovasi pelayanan yang diterapkan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%
	Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran;	NA	NA	NA	NA	NA	NA	95%
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>8.19</b>
	<b>Nilai Evaluasi SAKIP</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>80.15</b>
	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Perubahan Renstra ini disusun secara teknokratis dan disesuaikan dengan kebijakan politik yaitu dengan mengejawantahkan janji janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 ini disampaikan kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sampai dengan Tahun 2023.
2. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.

3. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2018-2023 dan sekaligus dijadikan sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2023.

Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang ini dapat dibangun komitmen bersamadari seluruh jajaran organisasi untuk taat azaz dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahun yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Jombang, Juni 2022  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang,



**Drs. MASDUQI ZAKARIA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670608-199403 1 014